

# *Profil Kesejahteraan Rakyat*

PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020

# Profil Kesejahteraan Rakyat

PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020

# PROFIL KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI MALUKU UTARA 2020

**ISBN** : 978-602-675-556-8

**Nomor Publikasi** :

**Nomor Katalog** : 4101003.82

**Ukuran Buku** : 21 cm x 29,7 cm

**Jumlah Halaman** : ix + 55 halaman

**Naskah:**

Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi Maluku Utara

**Penyunting:**

Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi Maluku Utara

**Gambar Kulit:**

Fungsi IPDS BPS Provinsi Maluku Utara

**Diterbitkan Oleh:**

© Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## **TIM PENYUSUN**

### **Profil Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2020**

#### **Penanggung Jawab Umum :**

Aidil Adha, SE, M.SE

#### **Penanggung Jawab Teknis :**

Insaf Santoso SST, M.Si

#### **Penyunting :**

Arifin M. Kahar, SST, M.Stat

#### **Penulis :**

Ratna Asih Wulandari, SST, M.Ak

#### **Pengolah Data :**

Ratna Asih Wulandari, SST, M.Ak

#### **Desain Cover dan Infografis:**

Muhammad Alham Musa, SST



## KATA PENGANTAR

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menjadi salah satu sumber data sosial ekonomi rumah tangga yang penting. BPS menyelenggarakan Susenas bertujuan untuk memotret aspek sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan pekerjaan.

Publikasi Profil Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2020 memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan rakyat dilihat dari berbagai faktor kehidupan. Data yang dipublikasikan dalam buku ini merupakan hasil Susenas yang dilaksanakan pada Maret 2020.

Buku ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan data, khususnya data mengenai kesejahteraan rakyat. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, diucapkan terimakasih.

Ternate, Desember 2021  
Kepala BPS Provinsi Maluku Utara

**Aidil Adha, SE, ME.**

<https://malut.bps.go.id>

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
1. Pendahuluan	1
2. Kependudukan	9
3. Pendidikan	17
4. Kesehatan, Fertilitas & KB	25
5. Perumahan	35
6. Lain-Lain	49

<https://malut.bps.go.id>

<https://malut.bps.go.id>



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 2.1	Persentase Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Pengeluaran, 2020	9
Gambar 2.2	Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur Angkatan Kerja dan Kelompok Pengeluaran, 2020	10
Gambar 2.3	Persentase Penduduk Berumur 15-19 Tahun yang Berstatus Kawin/Pernah Kawin menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Pengeluaran, 2020	11
Gambar 2.4	Persentase Penduduk Berumur 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran serta Penduduk Berumur 17 Tahun ke Atas yang Memiliki NIK menurut Kelompok Pengeluaran, 2020	12
Gambar 3.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Kelompok Pengeluaran, 2020	17
Gambar 3.2	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Status Pendidikan dan Kelompok Pengeluaran, 2020	18
Gambar 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Kelompok Umur dan Kelompok Pengeluaran, 2020	19
Gambar 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Jenjang Pendidikan dan Kelompok Pengeluaran, 2020	20
Gambar 3.5	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Kelompok Pengeluaran, 2020	22
Gambar 4.1	Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan menurut Kelompok Pengeluaran, 2020	25
Gambar 4.2	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama dan Kelompok Pengeluaran, 2020	26
Gambar 4.3	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Kelompok Pengeluaran, 2020	27

Gambar 4.4	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Tempat Melahirkan dan Kelompok Pengeluaran, 2020	28
Gambar 4.5	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Berat Badan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Ketika Dilahirkan dan Kelompok Pengeluaran, 2020	29
Gambar 4.6	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Penggunaan Alat KB atau Cara Tradisional untuk Menunda atau Mencegah Kehamilan dan Kelompok Pengeluaran, 2020	30
Gambar 4.7	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang Ber-KB menurut Jenis Alat KB dan Kelompok Pengeluaran, 2020	31
Gambar 5.1	Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati dan Kelompok Pengeluaran, 2020	35
Gambar 5.2	Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas dan Kelompok Pengeluaran, 2020	36
Gambar 5.3	Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas dan Kelompok Pengeluaran, 2020	37
Gambar 5.4	Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas dan Kelompok Pengeluaran, 2020	38
Gambar 5.5	Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Kelompok Pengeluaran, 2020	39
Gambar 5.6	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga dan Kelompok Pengeluaran, 2020	41
Gambar 5.7	Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Kelompok Pengeluaran, 2020	41
Gambar 5.8	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Bersih, Sumber Air Minum Layak dan Kelompok Pengeluaran, 2020	42
Gambar 5.9	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Penerangan dan Kelompok Pengeluaran, 2020	43

Gambar 5.10	Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak dan Kelompok Pengeluaran, 2020	44
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Kelompok Pengeluaran, 2020	49
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima dan Kelompok Pengeluaran, 2020	51
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Jaminan Sosial dan Kelompok Pengeluaran, 2020	52

<https://malut.bps.go.id>



# PENDAHULUAN





## 1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat umumnya menjadi tujuan pembangunan di setiap negara. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, sejak tahun 1990 *United Nations for Development Programme* (UNDP) mengembangkan suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan manusia (*Human Development Index* = HDI). Indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah; (1) tingkat harapan hidup, (2) tingkat melek huruf masyarakat, (3) tingkat pendapatan riil perkapita berdasarkan daya belinya. Indeks ini besarnya antara 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati angka 100 berarti indeks pembangunan manusianya tinggi atau dengan kata lain memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, demikian pula sebaliknya. Saat ini, IPM yang dilihat dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak, berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations/UN*) merumuskan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai cetak biru rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim. SDGs berisi 17 Tujuan, 169 Target dan 241 indikator global yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Semua tujuan, target, dan indikator ini diharapkan dapat dipenuhi oleh seluruh negara anggota PBB dalam rangka mensejahterakan penduduknya. Sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan SDGs ini, Presiden Jokowi Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perpres tersebut hadir dalam rangka untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian indikator-indikator SDGs dan telah diselaraskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi bisa didekati dengan berbagai cara atau sudut pandang, salah satunya adalah dari segi pendapatan. Semakin tinggi pendapatan maka otomatis masyarakat memiliki daya beli yang tinggi juga dalam mengkonsumsi semua kebutuhan sandang, pangan, dan papan demi keberlangsungan hidupnya. Namun sulitnya keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi besarnya pendapatan maka pendapatan masyarakat dapat didekati dengan pengeluaran/konsumsinya, baik pengeluaran/konsumsi untuk kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Menurut Teori Konsumsi Keynes, konsumsi akan meningkat apabila pendapatan meningkat. Teori ini juga mengemukakan bahwa pendapatan adalah merupakan determinan (faktor penentu utama) dari konsumsi. Oleh sebab itu, menurut teori ini besarnya nilai pendapatan bisa didekati dengan nilai pengeluaran.

Tingkat konsumsi masyarakat akan berbeda satu sama lain sebagai akibat perbedaan tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat. Perbedaan tingkat pendapatan ini mempengaruhi pemerataan pendapatan penduduk. Idealnya, setiap 10 persen penduduk memperoleh 10 persen penerimaan pendapatan. Pendapatan dianggap terdistribusikan sempurna apabila setiap individu mendapat bagian yang sama dari seluruh total pendapatan. Distribusi pendapatan dianggap kurang adil atau timpang apabila sebagian besar pendapatan dikuasai oleh sebagian kecil penduduk saja. Kenyataannya, penerima pendapatan tertinggi adalah kelompok menengah ke atas dan penerima pendapatan terendah adalah kelompok menengah ke bawah/masyarakat miskin.

Untuk menentukan pemerataan distribusi pendapatan, Bank Dunia (*World Bank*) membagi penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan pendapatannya, yaitu:

1. 40% penduduk berpendapatan rendah
2. 40% penduduk berpendapatan menengah
3. 20% penduduk berpendapatan tinggi.



Kriteria yang dipergunakan oleh Bank Dunia tersebut adalah:

1. Bila kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah pengeluarannya lebih kecil dari pada 12% dari keseluruhan pengeluaran, maka dikatakan bahwa daerah yang bersangkutan berada dalam tingkat ketimpangan tinggi.
2. Bila kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah pengeluarannya antara 12%-17% dari keseluruhan pengeluaran, maka dikatakan bahwa terjadi tingkat ketimpangan sedang (moderat).
3. Bila kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah pengeluarannya lebih dari pada 17% dari keseluruhan pengeluaran, maka dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi adalah rendah.

Dalam publikasi ini, profil kesejahteraan penduduk Maluku Utara akan dilihat menurut klasifikasi penduduk berdasarkan kelompok pengeluaran Bank Dunia, yaitu penduduk akan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan pengeluarannya. Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Tahun 2020 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.

Publikasi ini terbagi atas beberapa bagian yang terdiri atas penjelasan dan tabel maupun grafik. Publikasi ini memaparkan gambaran mengenai kependudukan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lainnya yang dikelompokkan berdasarkan ketiga kategori penduduk menurut kelompok pengeluaran oleh Bank Dunia. Dengan adanya ulasan mengenai berbagai bidang kehidupan (kependudukan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lainnya) menurut kelompok pendapatan, diharapkan dapat memotret kondisi nyata pemerataan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara.

<https://malut.bps.go.id>

# KEPENDUDUKAN

**32,2%**



0-14 tahun

**64,04%**



15-64 tahun

**3,94%**



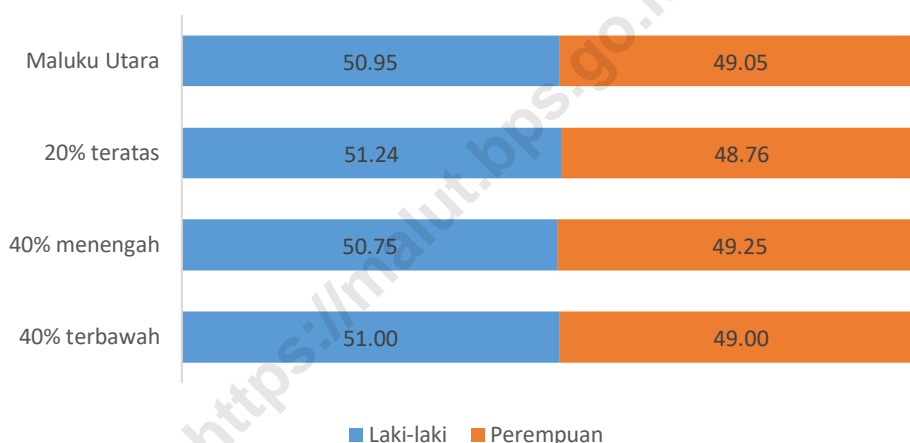
65 keatas



## 2. KEPENDUDUKAN

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2020, Begitu pula distribusi jenis kelamin laki-laki dan perempuan di Provinsi Maluku Utara secara total, penduduk laki-lakinya juga lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan yaitu sebesar 50,95 persen laki-laki dan sebesar 49,05 persen perempuan. Distribusi penduduk Maluku Utara berdasarkan jenis kelamin serta kelompok pengeluarannya dapat dilihat pada gambar 2.1.

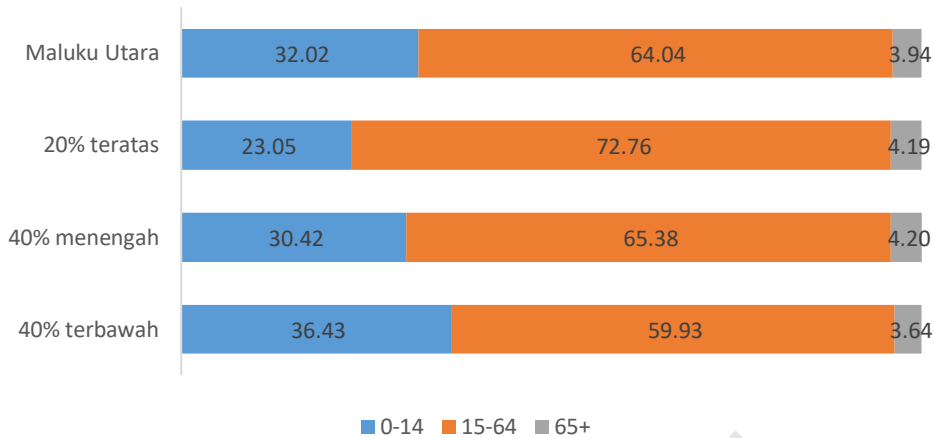
**Gambar 2.1**  
**Persentase Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Terdapat kemiripan pada distribusi penduduk laki-laki dan perempuan menurut ketiga kelompok pengeluaran. Untuk kelompok pengeluaran 40% terbawah, proporsi penduduk laki-laki sebesar 51,00 persen dan penduduk perempuan sebesar 49,00 persen. Untuk kelompok pengeluaran 40% menengah, penduduk laki-laki sebesar 50,75 persen dan penduduk perempuan sebesar 49,25 persen. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran 20% teratas, sebanyak 51,24 persennya adalah penduduk laki-laki dan sebanyak 48,76 persennya adalah penduduk perempuan.

**Gambar 2.2**  
**Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur Angkatan Kerja dan**  
**Kelompok Pengeluaran, 2020**

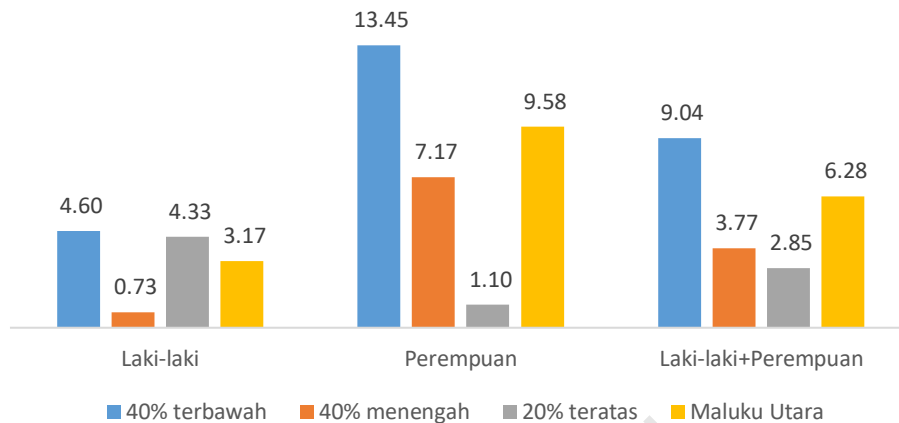


Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Dari gambar 2.2 dapat dilihat bahwa pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, komposisi sebanyak 36,43 persen penduduk yang berumur 0-14 tahun, sebanyak 59,93 persen penduduk berada pada usia angkatan kerja yaitu 15-64 tahun, serta sebanyak 3,64 persen pada kelompok pengeluaran ini berumur lebih dari 65 tahun. Pada kelompok pengeluaran 40% menengah, sebanyak 30,42 persen penduduknya berumur 0-14 tahun, sebanyak 65,38 persen berada pada usia angkatan kerja yaitu 15-64 tahun, serta sebanyak 4,20 persen pada kelompok pengeluaran ini berumur lebih dari 65 tahun. Pada kelompok pengeluaran 20% teratas, banyaknya anak berumur 0-14 tahun adalah sebesar 23,05 persen, sebanyak 72,76 persen penduduk berada pada kelompok umur 15-64 tahun dan sebesar 4,19 persen penduduk berada pada kelompok umur lebih dari 65 tahun.

Untuk Provinsi Maluku Utara, sebanyak 32,02 persen penduduknya berumur 0-14 tahun, sebanyak 64,04 persen penduduknya berumur 15-64 tahun serta sebanyak 3,94 persen berumur 65 tahun ke atas. Banyaknya usia 0-14 tahun pada kelompok pengeluaran 40% terbawah dibandingkan dengan kelompok 20% teratas dapat dimungkinkan karena pada kelompok pengeluaran 40% terbawah (yang diidentikkan dengan penduduk miskin) umumnya memiliki lebih banyak anak dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya (yang diidentikkan dengan penduduk menengah ke atas). Selain itu, selisih penduduk angkatan kerja pada kelompok pengeluaran 40% terbawah dengan 20% teratas juga cukup tinggi, yaitu mencapai 12,83 persen.

**Gambar 2.3**  
**Persentase Penduduk Berumur 15-19 Tahun yang Berstatus Kawin/Pernah Kawin menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Kelompok pengeluaran 40% terbawah merupakan kelompok pengeluaran dengan penduduk berumur 15-19 tahun yang berstatus kawin/pernah kawin paling besar dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya, baik secara total maupun menurut jenis kelamin. Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, sebesar 4,60 persen penduduk laki-laki berumur 15-19 tahun telah melangsungkan perkawinan dan sebesar 13,45 persen penduduk perempuan berumur 15-19 tahun telah melangsungkan perkawinan atau secara total sebesar 9,04 persen penduduk berumur 15-19 tahun pada kelompok pengeluaran ini telah melangsungkan perkawinan.

Pada kelompok pengeluaran 40% menengah, sebesar 0,73 persen penduduk laki-laki berumur 15-19 tahun telah melangsungkan perkawinan dan sebesar 7,17 persen penduduk perempuan berumur 15-19 tahun telah melangsungkan perkawinan atau secara total sebesar 3,77 persen penduduk berumur 15-19 tahun pada kelompok pengeluaran ini telah melangsungkan perkawinan. Kelompok pengeluaran 20% teratas merupakan kelompok pengeluaran dengan penduduk berumur 15-19 tahun yang berstatus kawin/pernah kawin paling sedikit dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya, baik secara total maupun menurut jenis kelamin.

Pada kelompok pengeluaran 20% teratas, 4,33 persen penduduk laki-laki berumur 15-19 tahun yang telah melangsungkan perkawinan dan sebesar 1,10 persen penduduk perempuan berumur 15-19 tahun telah melangsungkan



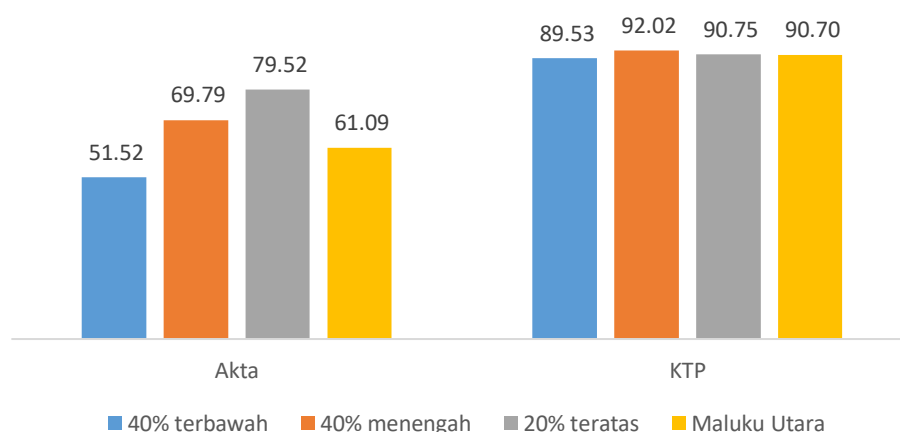
perkawinan atau secara total hanya sebesar 2,85 persen penduduk berumur 15-19 tahun pada kelompok pengeluaran ini telah melangsungkan perkawinan.

Untuk Provinsi Maluku Utara sendiri, sebanyak 3,17 persen laki-laki berumur 15-19 tahun telah melangsungkan perkawinan dan sebanyak 9,58 persen perempuan berumur 15-19 tahun telah melangsungkan perkawinan atau kalau kita lihat secara menyeluruh ada sebanyak 6,28 persen penduduk berusia 15-19 tahun di Maluku Utara telah melangsungkan perkawinan.

Lebih banyak penduduk berumur 15-19 tahun yang berstatus kawin pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, khususnya untuk penduduk perempuan, menunjukkan bahwa pada kelompok pengeluaran tersebut perempuan menikah di usia yang dini sebagai akibat faktor ekonomi. Perempuan dari kelompok pengeluaran ini menikah di usia dini dengan harapan bisa bergantung kepada suami untuk menanggung biaya hidupnya.

Untuk mengetahui profil kesejahteraan rakyat, salah satunya bisa dilihat dari kepedulian masyarakat terhadap kepengurusan akta kelahiran bagi balita serta kepedulian terhadap kepengurusan surat kependudukan lain seperti Kartu Keluarga (KK) ataupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana di kedua kartu tersebut terdapat NIK. Kepemilikan akta kelahiran dan KTP sangat diperlukan sebagai bukti identitas diri yang dapat digunakan pula untuk urusan administrasi kependudukan, pendaftaran sekolah/kerja, pendataan bantuan pemerintah, perizinan usaha, dan lainnya.

**Gambar 2.4**  
**Persentase Penduduk Berumur 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran serta Penduduk Berumur 17 Tahun ke Atas yang Memiliki NIK menurut Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)



Gambar 2.4 menunjukkan persentase kepemilikan akta kelahiran untuk anak berumur 0-4 tahun serta kepemilikan NIK untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas. Dari gambar tersebut terlihat bahwa kelompok pengeluaran 40% terbawah merupakan kelompok pengeluaran dengan persentase terendah dalam hal kepemilikan akta kelahiran untuk anak berumur 0-4 tahun dan kepemilikan NIK untuk penduduk berumur 17 tahun ke atas.

Pada kelompok pengeluaran 40% terendah, hanya sebesar 51,52 persen penduduk berumur 0-4 tahun pada kelompok pengeluaran ini yang memiliki akta kelahiran, sedangkan yang memiliki NIK adalah sebesar 89,53 persen dari penduduk berumur 17 tahun ke atas. Pada kelompok pengeluaran 40% menengah, sebesar 69,79 persen penduduk berumur 0-4 tahun sudah memiliki akta kelahiran dan sebesar 92,02 persen penduduk berumur 17 tahun ke atas sudah memiliki NIK.

Kelompok pengeluaran 20% teratas merupakan kelompok dengan penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran terbanyak. Pada kelompok pengeluaran ini, sebanyak 79,52 persen penduduk berumur 0-4 tahun telah memiliki akta kelahiran serta sebanyak 90,75 persen penduduk berumur 17 tahun ke atas telah memiliki NIK. Sedangkan untuk Provinsi Maluku Utara, sebanyak 61,09 persen penduduk berusia 0-4 tahun telah memiliki akta kelahiran dan sebanyak 90,70 penduduk berumur 17 tahun ke atas telah memiliki NIK.

<https://malut.bps.go.id>

# PENDIDIKAN

Dari seluruh penduduk Maluku Utara yang berumur 7-24 tahun :

**0,43%** ➔ yang tidak/belum pernah bersekolah

**36,79%** ➔ masih bersekolah di jenjang SD/ sederajat

**16,27%** ➔ masih bersekolah di jenjang SMP/ sederajat

**15,18%** ➔ masih bersekolah SMA/ sederajat

**7,59%** ➔ masih bersekolah di jenjang perguruan tinggi

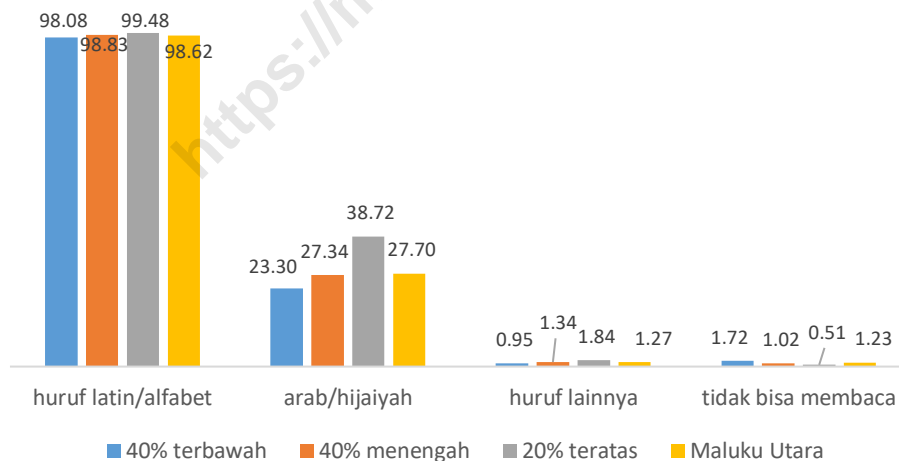
**23,74%** ➔ sudah tidak bersekolah lagi



### 3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan modal dasar bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Pendidikan juga menjadi fokus sasaran pembangunan di Indonesia dimana pemerintah mengalokasikan 20 persen dana APBN Tahun 2020 untuk pendidikan. Anggaran tersebut disalurkan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah-sekolah di seluruh pelosok negeri. Belum lagi ditambah dengan program-program unggulan pemerintah di bidang pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP). Manfaat dari besarnya anggaran pendidikan yang dikucurkan bagi masyarakat Indonesia adalah masyarakat bisa mengenyam pendidikan dasar dengan gratis. Dengan tingginya anggaran untuk pendidikan, pemerintah berharap masyarakat Indonesia bisa mengenyam pendidikan dasar sampai tuntas, serta tidak ada lagi penduduk yang buta huruf.

**Gambar 3.1**  
**Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



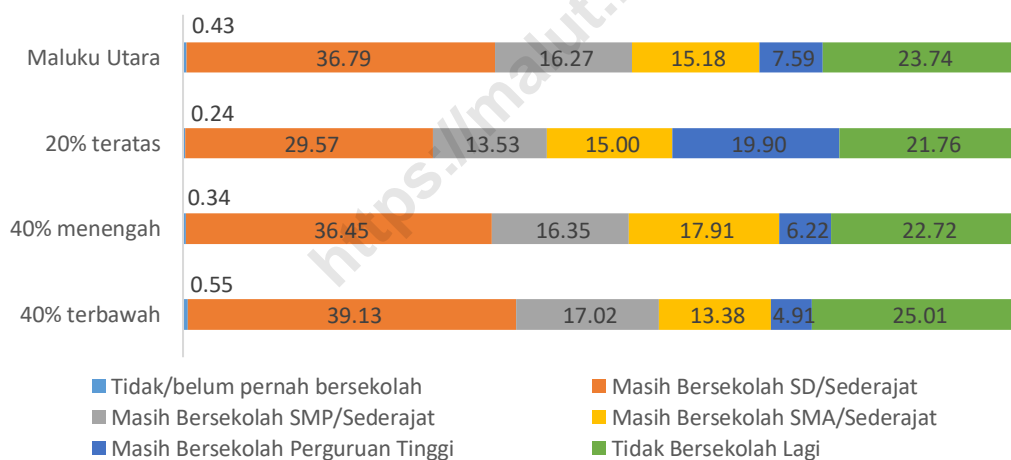
Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Gambaran pendidikan bisa dilihat salah satunya dari kemampuan penduduk dalam baca tulis huruf. Hampir seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas bisa membaca dan menulis huruf latin/alfabet pada ketiga kelompok pengeluaran, yaitu lebih dari 98 persen penduduk pada masing-masing kelompok pengeluaran. Selain huruf latin, sebagian penduduk Maluku Utara dapat membaca dan menulis

huruf hijaiyah, yaitu sebanyak 27,70 persen. Menurut kelompok pengeluaran, penduduk kelompok 20% teratas lebih banyak yang bisa membaca dan menulis huruf hijaiyah dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya.

Hanya sedikit penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf apapun, yaitu hanya sebesar 1,72 persen pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, sebesar 1,02 persen pada kelompok pengeluaran 40% pertengahan dan hanya sebesar 0,51 persen pada kelompok pengeluaran 20% teratas. Secara umum, penduduk Maluku Utara yang berumur 15 tahun ke atas dan tidak dapat membaca dan menullis huruf apapun adalah sebanyak 1,23 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah hampir berhasil dalam mengentaskan buta huruf di Maluku Utara, walaupun masih ada beberapa penduduk yang belum bisa membaca dan menulis sama sekali.

**Gambar 3.2**  
**Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Status Pendidikan dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

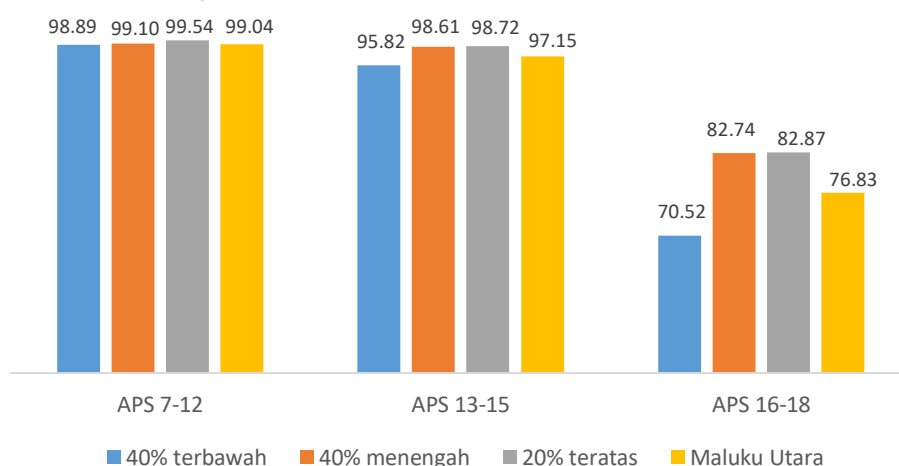
Selain kemampuan membaca dan menulis, gambaran pendidikan lainnya yang bisa dilihat adalah status pendidikan penduduk pada usia sekolah, yaitu penduduk dengan umur 7-24 tahun. Dari seluruh penduduk Maluku Utara yang berumur 7-24 tahun, yang tidak/belum pernah bersekolah adalah sebanyak 0,43 persen, sebanyak 36,79 persen masih bersekolah di jenjang SD/ sederajat, sebanyak 16,27 persen masih bersekolah di jenjang SMP/ sederajat, sebanyak 15,18 persen masih bersekolah SMA/ sederajat, sebanyak 7,59 persen masih



bersekolah di jenjang perguruan tinggi, serta sebanyak 23,74 persen sudah tidak bersekolah lagi.

Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, hanya sebesar 4,91 persen saja dari penduduk berumur 7-24 tahun yang masih bersekolah di jenjang perguruan tinggi. Pada kelompok pengeluaran 40% menengah terdapat 6,22 persen penduduk berumur 7-24 tahun yang masih bersekolah di jenjang perguruan tinggi. Sedangkan pada kelompok pengeluaran 20% teratas terdapat 19,90 persen penduduk berumur 7-24 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang perguruan tinggi. Perbedaan yang cukup jauh antara penduduk berumur 7-24 tahun pada kelompok pengeluaran 40% terbawah dengan kelompok pengeluaran 20% teratas yang bersekolah di jenjang perguruan tinggi bisa dijelaskan bahwa pada kelompok pengeluaran 40% terbawah memiliki hambatan dari segi ekonomi. Banyaknya penduduk berumur 7-24 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi juga disebabkan faktor ekonomi yang menuntut mereka bekerja untuk membantu mencari nafkah atau menikah supaya beban hidup ditanggung pasangan dibandingkan dengan bersekolah pada jenjang perguruan tinggi. Penduduk pada kelompok pengeluaran 40% terbawah juga masih beranggapan bahwa dengan ijazah SMP/ sederajat atau SMA/ sederajat sudah lebih dari cukup untuk bekerja mencari nafkah.

**Gambar 3.3**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Kelompok Umur dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



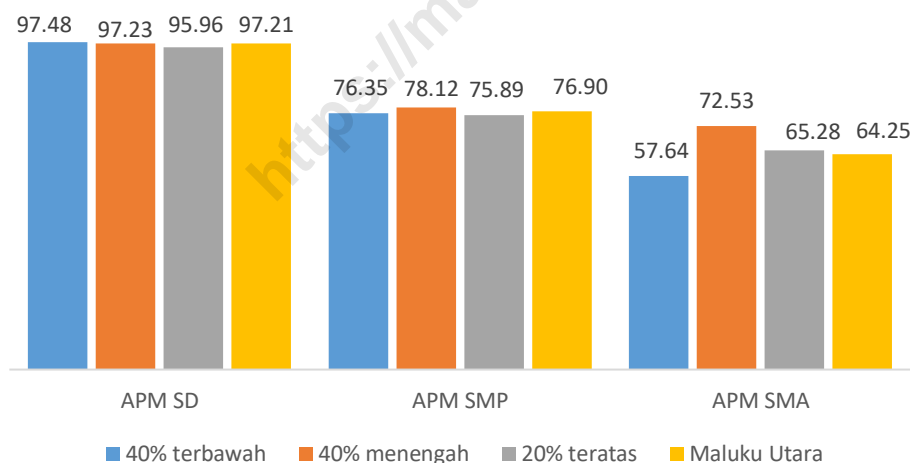
Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada

kelompok umur tersebut. APS hanya melihat proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang masih bersekolah tanpa memandang jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. APS 7-12 tahun pada semua kelompok pengeluaran menunjukkan bahwa APS mendekati angka 100 yang berarti hampir 100 persen penduduk berumur 7-12 tahun sedang bersekolah, hal yang sama juga terjadi untuk APS 13-15 tahun pada semua kelompok pengeluaran yang mendekati angka 100.

APS 16-18 tahun pada kelompok pengeluaran 40% terbawah adalah sebesar 70,52 yang menunjukkan bahwa pada kelompok pengeluaran ini masih banyak penduduk berumur 16-18 tahun yang tidak bersekolah. APS 16-18 tahun pada kelompok pengeluaran 40% terbawah merupakan APS terendah dibandingkan dengan APS pada kelompok pengeluaran lainnya, bahkan di bawah APS Provinsi Maluku Utara sebesar 76,83. APS 16-18 tertinggi adalah sebesar 82,87 yaitu pada kelompok pengeluaran 20% teratas.

**Gambar 3.4**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Jenjang Pendidikan dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berbeda dengan APS yang hanya melihat status sekolah penduduk pada kelompok umur tertentu, APM juga melihat jenjang pendidikan yang sesuai untuk kelompok umur tersebut. APM SD pada semua kelompok pengeluaran



menunjukkan bahwa APM mendekati angka 100 yang berarti hampir 100 persen penduduk berumur 7-12 tahun sedang bersekolah di jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya yaitu jenjang SD.

APM SMP pada kelompok pengeluaran 40% terbawah adalah sebesar 76,35 sedangkan pada kelompok pengeluaran 20% teratas adalah sebesar 75,89. Selanjutnya, APM SMA pada kelompok pengeluaran 40% terbawah adalah sebesar 57,64 saja, angka tersebut di bawah APM SMA Provinsi Maluku Utara sebesar 64,25. Hal tersebut menunjukkan masih banyaknya penduduk berumur 16-18 tahun pada kelompok pengeluaran 40% terbawah yang bersekolah bukan di jenjang yang sesuai dengan yang seharusnya yaitu jenjang SMA/ sederajat. APM SMA pada kelompok pengeluaran 40% menengah dan 20% teratas yaitu berturut-turut 72,53 dan 65,28 dan berada di atas APM SMA Provinsi Maluku Utara.

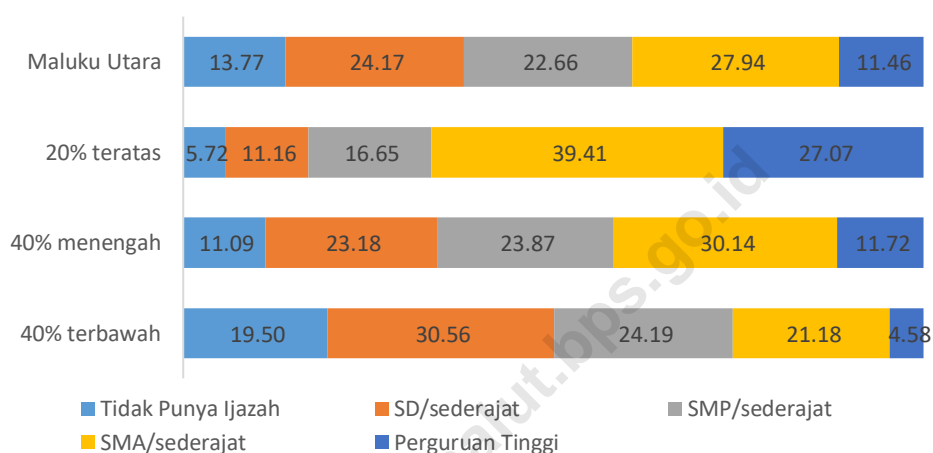
Tidak tersedianya Taman Kanak-Kanak (TK) di beberapa wilayah di Maluku Utara menjadi salah satu penyebab rendahnya APM. Hal tersebut dikarenakan penduduk yang berusia 5-6 tahun dan telah lulus pendidikan prasekolah seperti PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) akan melanjutkan pendidikannya langsung ke jenjang SD, padahal di sisi lain terdapat peraturan yang mengharuskan bahwa penduduk harus berumur 7 tahun untuk dapat masuk ke jenjang SD. Dengan diterimanya penduduk berumur 5-6 tahun untuk bersekolah di jenjang SD, akan berefek domino dimana pada jenjang pendidikan berikutnya pun penduduk tersebut bersekolah di jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan umurnya. Tidak tepatnya jenjang pendidikan dengan umur penduduk akan berpengaruh terhadap APM. Oleh sebab itu perlu partisipasi dari berbagai pihak untuk mendukung penduduk Maluku Utara agar bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya sehingga APM Provinsi Maluku Utara dapat meningkat.

Gambaran pendidikan lainnya yang bisa kita lihat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rakyat yaitu pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini bisa dilihat dari ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki oleh penduduk. Informasi mengenai ijazah/STTB tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, sebanyak 19,50 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah. Pada kelompok pengeluaran ini, sebanyak 30,56 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas

memiliki ijazah SD/ sederajat, sebesar 24,19 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas memiliki ijazah SMP/ sederajat dan sebesar 21,18 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas memiliki ijazah SMA/ sederajat. Hanya sebesar 4,58 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas pada kelompok pengeluaran 40% terbawah yang menamatkan pendidikannya sampai perguruan tinggi.

**Gambar 3.5**  
**Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Berbeda dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah, pada kelompok pengeluaran 20% teratas hanya sebesar 5,72 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah. Pada kelompok pengeluaran ini, sebesar 11,16 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas telah menamatkan pendidikannya sampai jenjang SD/ sederajat dan sebesar 16,65 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas telah menamatkan pendidikannya sampai jenjang SMP/ sederajat. Selain itu, pada kelompok pengeluaran 20% teratas ini terdapat 39,41 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikannya sampai jenjang SMA/ sederajat. Sebesar 27,07 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas pada kelompok pengeluaran 20% teratas telah menamatkan pendidikannya sampai perguruan tinggi.

# KESEHATAN, FERTILITAS & KB



Pada kenyatannya di Maluku Utara, **semakin tinggi pendapatan** maka **semakin tinggi juga persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan**

**40%  
terbawah**



**13,44%** penduduk mengalami keluhan kesehatan

**40%  
menengah**



**17,53%** penduduk mengalami keluhan kesehatan

**20%  
keatas**



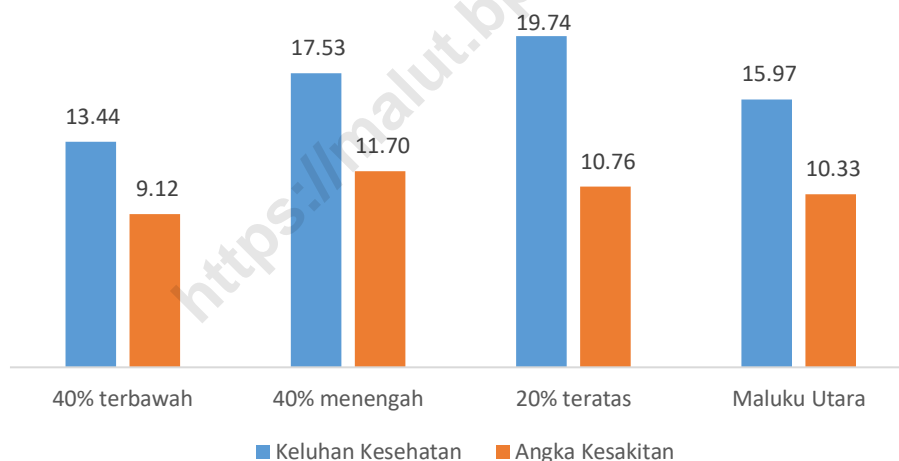
**19,74%** penduduk mengalami keluhan kesehatan



## 4. KESEHATAN, FERTILITAS & KB

Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan aspek yang menjadi fokus sasaran pembangunan pemerintah Indonesia. Setiap tahunnya, pemerintah mengalokasikan 5 persen APBN demi terselenggaranya fasilitas kesehatan yang memadai. Kesejahteraan rakyat juga bisa dilihat dari faktor kesehatan. Hal tersebut dikarenakan asupan gizi yang baik dan seimbang tentunya akan menimbulkan sistem imun yang baik untuk melawan virus/bakteri jahat bagi tubuh sehingga tubuh jarang sakit. Asupan gizi yang kurang baik dan tidak seimbang tentunya akan mempengaruhi kondisi tubuh dan sistem imun tubuh dalam melawan virus/bakteri penyebab penyakit.

**Gambar 4.1**  
**Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir dan Angka Kesakitan menurut Kelompok Pengeluaran, 2020**

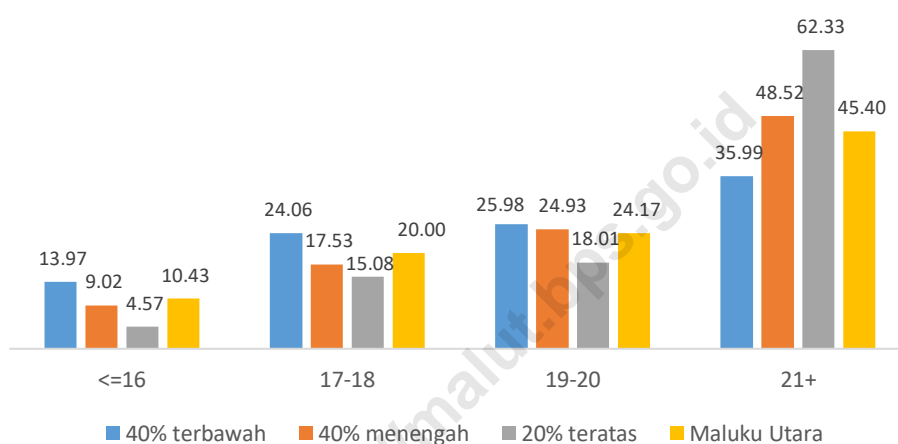


Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Pada kenyataannya di Maluku Utara, semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi juga persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah terdapat 13,44 persen penduduk mengalami keluhan kesehatan. Pada kelompok pengeluaran 40% menengah terdapat 17,53 persen penduduk mengalami keluhan kesehatan. Sedangkan pada kelompok pengeluaran 20% teratas terdapat 19,74 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan.

Angka kesakitan Maluku Utara adalah sebesar 10,33 persen. Angka kesakitan pada kelompok pengeluaran 40% terbawah yaitu sebesar 9,12 persen. Angka kesakitan pada kelompok pengeluaran 40% menengah adalah sebesar 11,70 persen dan angka kesakitan pada kelompok pengeluaran 20% teratas adalah sebesar 10,76 persen.

**Gambar 4.2**  
**Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama dan Kelompok Pengeluaran, 2020**

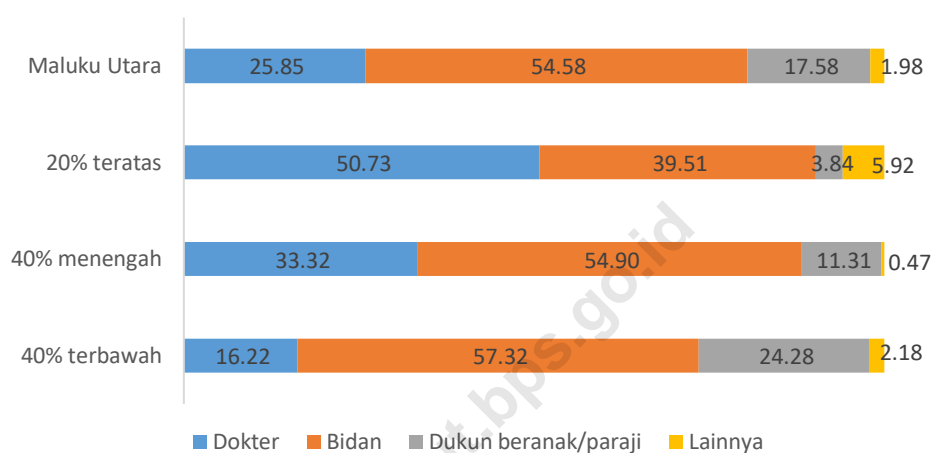


Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah terdapat 13,97 perempuan berumur 10 tahun ke atas yang berstatus kawin dengan usia kawin pertamanya kurang dari atau sama dengan 16 tahun. Pada kelompok pengeluaran ini terdapat 24,06 persen penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas yang berstatus kawin dengan umur kawin pertama 17-18 tahun. Sebanyak 25,98 persen penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas yang berstatus kawin pada kelompok pengeluaran ini melakukan kawin pertama pada umur 19-20 tahun dan sebesar 35,99 yang umur kawinnya lebih dari 21 tahun. Pada kelompok pengeluaran 20% teratas, penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas yang berstatus kawin dan melakukan kawin pertama pada umur kurang dari atau sama dengan 16 tahun adalah sebesar 4,57 persen, yang melakukan kawin pertama pada umur 17-18 tahun adalah sebesar 15,08 persen, yang melakukan kawin pertama pada umur 19-20 tahun adalah sebesar 18,01 persen serta yang melakukan kawin pertama pada umur 21 tahun ke atas adalah sebesar 62,33

persen. Untuk Maluku Utara, sebanyak 30,43 persen penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas dan berstatus kawin melangsungkan perkawinan pertama pada umur kurang dari atau sama dengan 18 tahun.

**Gambar 4.3**  
**Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

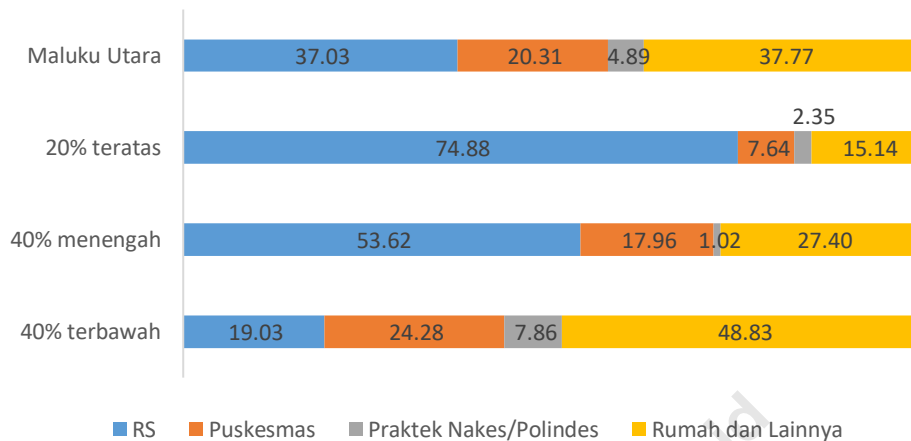
Keterangan:

Dokter meliputi dokter umum dan dokter kandungan.

Lainnya meliputi perawat dan lainnya, termasuk persalinan yang tidak dibantu oleh siapapun.

Pada kelompok pengeluaran 20% teratas, terdapat sebanyak 50,73 persen perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir yang tenaga penolong persalinannya adalah dokter, serta sebanyak 39,51 persen yang tenaga penolong persalinannya adalah bidan dan hanya sebesar 3,84 persen yang proses persalinannya ditolong oleh dukun beranak/paraji. Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah terdapat sebanyak 16,22 persen saja perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir yang tenaga penolong persalinannya adalah dokter, sebanyak 57,32 persen yang tenaga penolong persalinannya adalah bidan dan sebesar 24,28 persen yang proses persalinannya ditolong oleh dukun beranak/paraji serta sebanyak 2,18 persen proses persalinannya ditolong oleh tenaga lainnya atau melahirkan sendiri.

**Gambar 4.4**  
**Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Tempat Melahirkan dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Keterangan:

RS meliputi RS Pemerintah/Swasta/RSIA/Rumah Bersalin/Klinik.  
 Puskesmas meliputi Puskesmas dan Pustu.

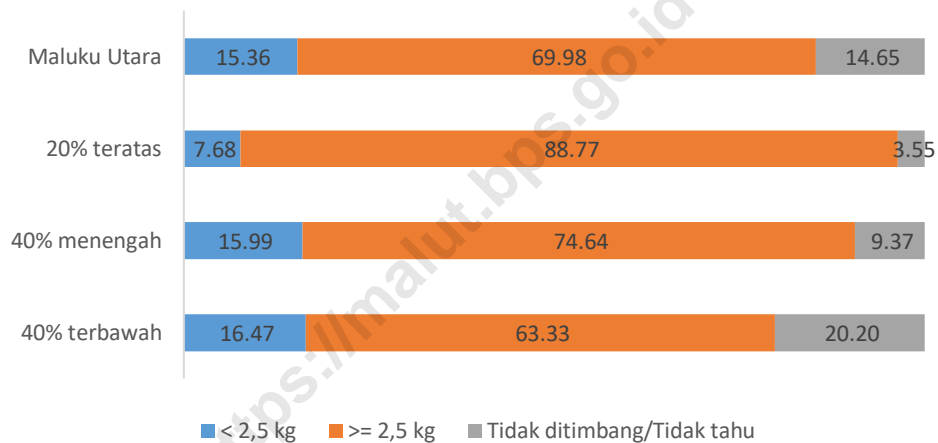
Pada kelompok pengeluaran 20% teratas, terdapat sebanyak 74,88 persen perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir di rumah sakit baik RS Pemerintah/ Swasta, RSIA Rumah Bersalin, dan klinik, sebanyak 7,64 melahirkan di puskesmas/pustu, sebanyak 2,35 persen melahirkan di tempat praktek tenaga kesehatan, polindes dan poskesdes, serta sebesar 15,14 persen yang proses persalinannya dilakukan di rumah atau lainnya. Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah terdapat sebanyak 19,03 persen perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir yang melahirkan di rumah sakit, sebanyak 24,28 persen melahirkan di puskesmas/pustu, sebanyak 7,86 persen melahirkan di praktek tenaga kesehatan, polindes dan poskesdes, serta sebesar 48,83 persen yang proses persalinannya dilakukan di rumah/lainnya.

Berat badan anak lahir hidup yang kurang dari 2500 gram adalah termasuk Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Secara umum, sebagian besar berat bayi yang dilahirkan sudah melebihi 2500 gram di semua kelompok pengeluaran. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2020, terdapat 16,47 persen bayi pada kelompok pengeluaran 40% terbawah yang berat ketika lahirnya kurang dari 2500 gram, sedangkan pada kelompok pengeluaran 40% menengah terdapat 15,99



persen bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2500 gram dan pada kelompok pengeluaran 20% teratas terdapat 7,68 persen bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2500 gram. Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah terdapat 20,20 persen bayi baru lahir yang tidak diketahui berat badan ketika dilahirkan, hal tersebut bisa dikarenakan pada kelompok pengeluaran ini terdapat 24,28 persen bayi lahir yang ditolong oleh dukun paraji sehingga tidak dilakukan penimbangan berat badan ketika bayi baru dilahirkan.

**Gambar 4.5**  
**Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir menurut Berat Badan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Ketika Dilahirkan dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

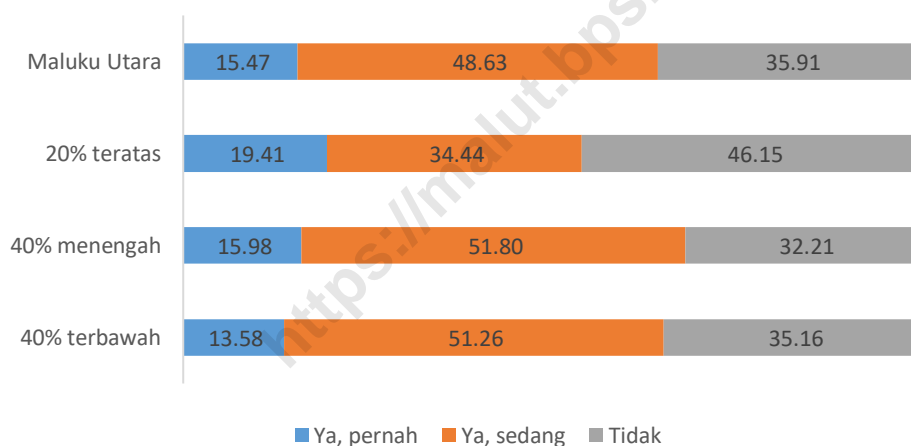
Gambaran kesehatan fertilitas bisa dilihat dari hasil Data Susenas Maret 2020 adalah banyaknya perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin yang menggunakan alat KB atau memakai cara tradisional untuk menunda atau mencegah kehamilan. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2020, semakin tinggi kelompok pengeluaran berbanding terbalik dengan tingkat partisipasi KB. Pada kelompok pengeluaran 20% teratas, sebesar 19,41 persen perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin mengaku pernah ber-KB dan sebesar 34,44 persen sedang KB dan sebesar 46,15 persen tidak ber-KB. Pada kelompok pengeluaran 40% menengah, sebesar 32,21 persen perempuan berumur 15-49 tahun dan berstatus pernah kawin mengaku tidak pernah KB. Sebesar 51,80 persen perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin pada kelompok

pengeluaran 40% menengah mengaku sedang KB dan sebesar 15,98 persen mengaku pernah memakai alat KB.

Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, sebesar 13,58 persen perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin mengaku pernah memakai alat/cara KB, sebesar 51,26 persen sedang memakai alat/cara KB dan sebesar 35,16 persen perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin mengaku tidak pernah mengikuti cara/alat KB. Untuk Maluku Utara, sebesar 15,47 persen perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin mengaku pernah memakai alat/cara KB, sebesar 48,63 persen mengaku sedang memakai alat/cara KB, dan sebesar 35,91 persen mengaku tidak pernah memakai alat/cara KB.

**Gambar 4.6**  
**Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Penggunaan Alat KB atau Cara Tradisional untuk Menunda atau Mencegah Kehamilan dan Kelompok Pengeluaran, 2020**

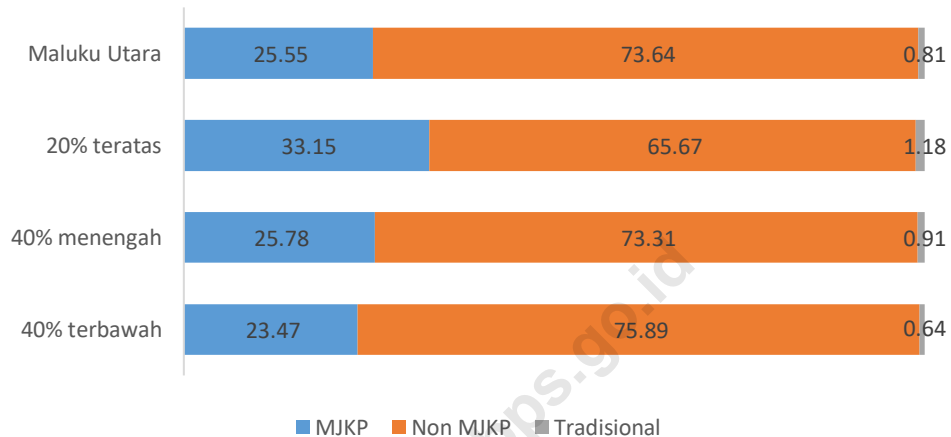


Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Dari perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan sedang memakai alat/cara KB tersebut, bisa kita lihat lebih jauh jenis alat KB-nya. Jenis alat KB pada publikasi ini dikelompokkan menjadi metode kontrasepsi modern dan metode kontrasepsi tradisional. Metode kontrasepsi modern pun dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (non MKJP). Jenis alat KB pada MKJP yaitu Tubektomi/MOW, Vasektomi/MOP, IUD, dan Susuk KB/implan. Jenis alat KB yang Non MKJP yaitu suntikan, pil, kondom pria/karet KB, kondom wanita/intravag/diafragma. Sedangkan yang termasuk metode kontrasepsi tradisional

yaitu metode menyusui alami, metode pantang berkala/kalender, metode senggama terputus, minum jamu, serta metode-metode tradisional lainnya.

**Gambar 4.7**  
**Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang Ber-KB menurut Jenis Alat KB dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

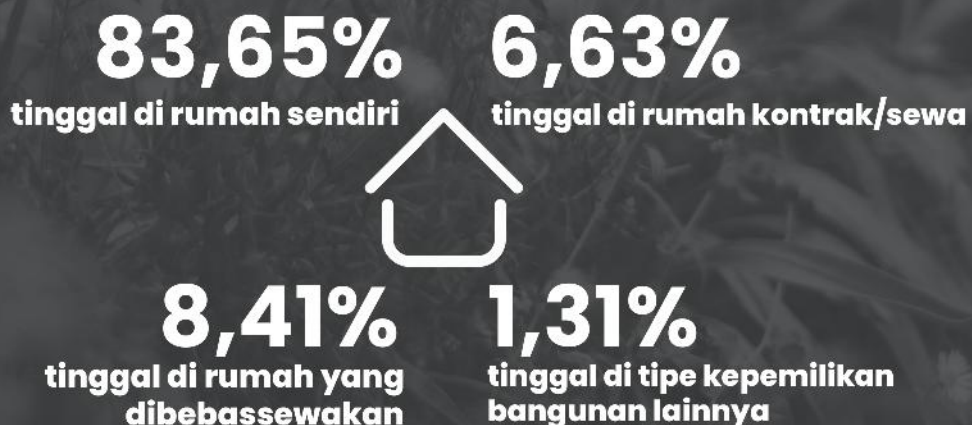
Perempuan di Maluku Utara yang berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dan memakai alat/cara KB lebih banyak yang menggunakan alat/cara KB dengan metode non MKJP, yaitu sebesar 73,64 persen. Jika dilihat dari kelompok pengeluarannya pun sama, sebagian besar perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin memakai alat/cara KB menggunakan metode Non MKJP. Perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan memakai alat/cara KB yang menggunakan metode MKJP tertinggi ada pada kelompok 20% teratas.

<https://malut.bps.go.id>

# PERUMAHAN



Biasanya, **semakin tinggi kesejahteraan penduduk** ditandai dengan **semakin bagusnya kualitas rumah serta semakin lengkapnya fasilitas** di dalam rumah. Di wilayah Maluku Utara, tingkat kesejahteraan dari aspek perumahan juga ditandai dengan tersedianya **fasilitas buang air besar, tersedianya sumber air minum bersih, serta tersedianya listrik**.

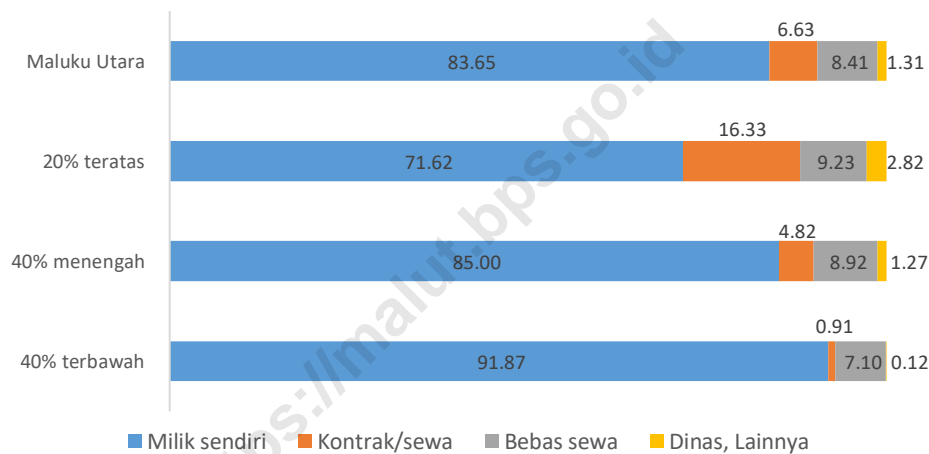




## 5. PERUMAHAN

Perumahan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Biasanya, semakin tinggi kesejahteraan penduduk ditandai dengan semakin bagusnya kualitas rumah serta semakin lengkapnya fasilitas di dalam rumah. Di wilayah Maluku Utara, tingkat kesejahteraan dari aspek perumahan juga ditandai dengan tersedianya fasilitas buang air besar, tersedianya sumber air minum bersih, serta tersedianya listrik.

**Gambar 5.1**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati dan Kelompok Pengeluaran, 2020**

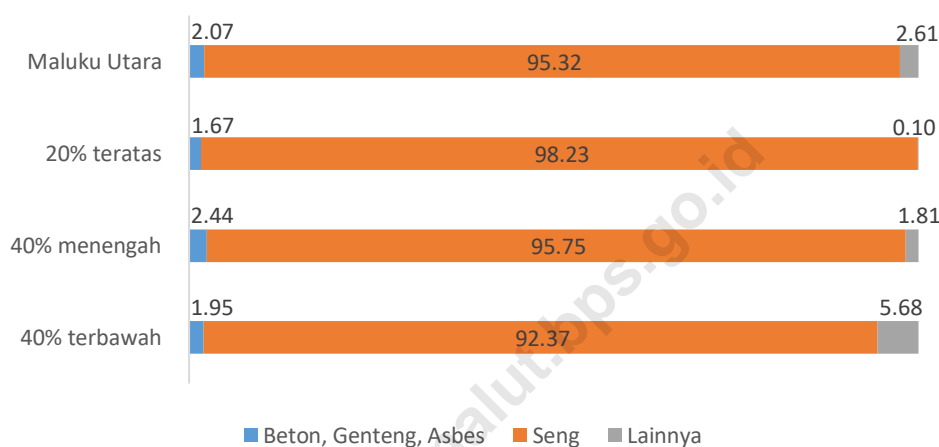


Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Dari gambar terlihat bahwa mayoritas rumah tangga di Maluku Utara tinggal di rumah milik sendiri, yaitu sebesar 83,65 persen. Sebesar 6,63 persen rumah tangga tinggal di rumah kontrak/sewa, sebesar 8,41 persen rumah tangga tinggal di rumah yang dibebassewakan, serta sebesar 1,31 persen tinggal di tipe kepemilikan bangunan lainnya. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluarannya, sebesar 91,87 persen rumah tangga dari kelompok pengeluaran 40% terbawah tinggal di rumah/bangunan milik sendiri, sebesar 0,91 persen tinggal di bangunan dengan cara kontrak/sewa, sebesar 7,10 persen tinggal di rumah yang dibebassewakan, dan sebesar 0,12 persen tinggal di tipe kepemilikan bangunan lainnya. Pada kelompok pengeluaran 40% menengah, sebesar 85,00 persen rumah tangga tinggal di bangunan milik sendiri, sebesar 4,82 persen tinggal di rumah/bangunan dengan mengontrak/menyewa, sebesar 8,92 persen tinggal di bangunan yang dibebassewakan, dan sebesar 1,27 persen tinggal di tipe

kepemilikan bangunan lainnya. Pada kelompok pengeluaran 20% teratas, sebesar 71,62 persen rumah tangga tinggal di rumah/bangunan milik sendiri, sebesar 16,33 persen tinggal di bangunan dengan cara kontrak/sewa, sebesar 9,23 persen tinggal di dalam bangunan yang dibebasewakan, serta sebesar 2,82 persen tinggal di tipe kepemilikan bangunan lainnya.

**Gambar 5.2**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



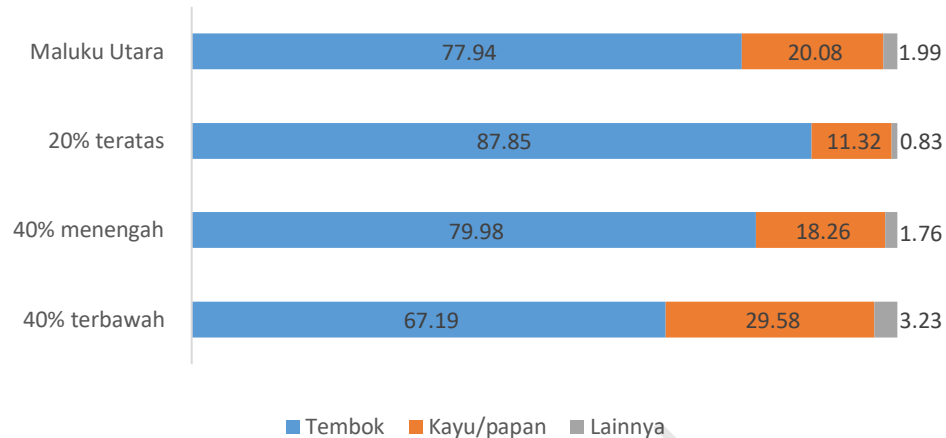
Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Secara umum, jenis atap terluas rumah tangga di Maluku Utara adalah seng, baik pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, 40% menengah, maupun 20% teratas. Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah selain menggunakan seng sebagai atap terluas bangunan tempat tinggalnya, rumah tangga pada kelompok ini menggunakan jenis atap lainnya (seperti bambu, kayu/sirap, jerami, ijuk, daun-daunan, atap rumbia, dan lainnya) yaitu sebesar 5,68 persen dan sisanya sebesar 1,95 persen menggunakan beton/genteng/asbes sebagai atap rumahnya. Berbeda dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah, rumah tangga pada kelompok pengeluaran 20% teratas menggunakan jenis atap beton/genteng/asbes yaitu sebesar 1,67 persen dan sisanya menggunakan jenis atap lainnya sebesar 0,10 persen saja.

Selain melihat jenis bahan bangunan atap rumah terluas, kondisi kesejahteraan masyarakat juga bisa dilihat dari bahan bangunan utama dinding rumah terluas yang bisa dilihat pada Gambar 5.3 di bawah ini.



**Gambar 5.3**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bangunan Utama Dinding**  
**Rumah Terluas dan Kelompok Pengeluaran, 2020**

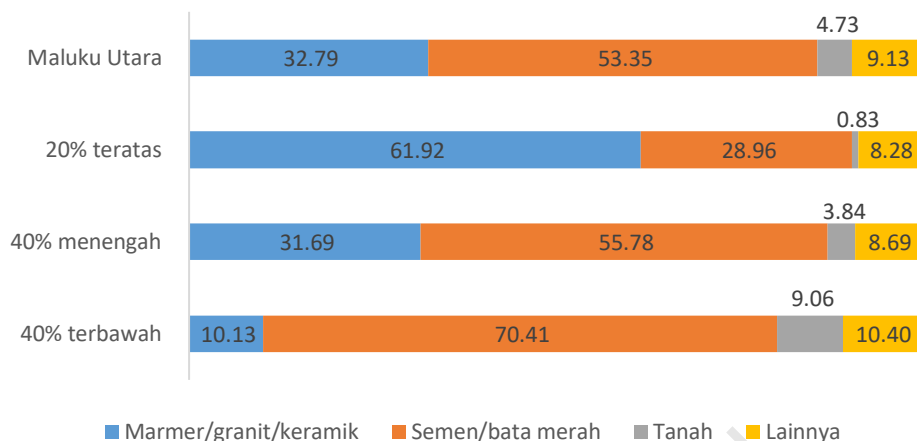


Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Perumahan di Maluku Utara mayoritas memakai tembok sebagai bahan bangunan utama dinding rumah tempat tinggal, yaitu sebesar 77,94 persen dan sebesar 20,08 persen memakai kayu/papan dan sebesar 1,99 persen memakai bahan dinding lainnya seperti bambu, anyaman bambu, plesteran bambu, batang kayu, dan lain sebagainya. Untuk ketiga kelompok pengeluaran pun sama yaitu mayoritas rumah tangga menggunakan tembok sebagai bahan utama dinding rumah terluas, yaitu sebesar 87,85 persen pada kelompok pengeluaran 20% teratas, sebesar 79,98 persen pada kelompok pengeluaran 40% menengah dan sebesar 67,19 persen pada rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah. Namun pada kelompok pengeluaran 40% terbawah masih cukup banyak rumah tangga yang memakai kayu/papan sebagai bahan utama dinding rumah terluas yaitu sebesar 29,58 persen serta sebesar 3,23 persen menggunakan jenis dinding lainnya.

Selain melihat jenis bahan bangunan utama dinding rumah terluas, kondisi kesejahteraan masyarakat juga bisa dilihat dari bahan bangunan utama lantai rumah terluas yang digunakan oleh rumah tangga. Gambaran mengenai jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas dapat dilihat pada gambar selanjutnya.

**Gambar 5.4**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah**  
**Terluas dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Di Maluku Utara, sebanyak 32,79 persen rumah tangga menggunakan marmer/granit/keramik sebagai bahan bangunan utama lantai rumah terluas, rumah tangga yang menggunakan semen/bata merah sebagai lantai yaitu sebesar 53,35 persen, dan sebesar 4,73 persen masih menggunakan tanah sebagai lantai utama rumahnya serta sebesar 9,13 persen menggunakan jenis lantai lainnya seperti parket/vinil/parket, ubin/tegel/teraso/, kayu/papan, bambu, dan lainnya.

Penggunaan jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas berbeda-beda pada setiap kelompok pengeluaran dan menarik untuk dibahas lebih lanjut. Pada kelompok pengeluaran 20% teratas, mayoritas rumah tangga menggunakan jenis lantai marmer/granit/keramik yaitu sebesar 61,92 persen, sedangkan yang menggunakan semen/bata merah yaitu sebesar 28,96 persen serta sebesar 8,28 persen rumah tangga menggunakan jenis lantai lainnya.

Pada kelompok pengeluaran 40% menengah mayoritas rumah tangga menggunakan jenis lantai semen/bata merah yaitu sebesar 55,78 persen, sebesar 31,69 persen menggunakan marmer/granit/keramik, rumah tangga menggunakan jenis lantai tanah sebesar 3,84 persen, dan sebesar 8,69 persen menggunakan jenis lantai lainnya.

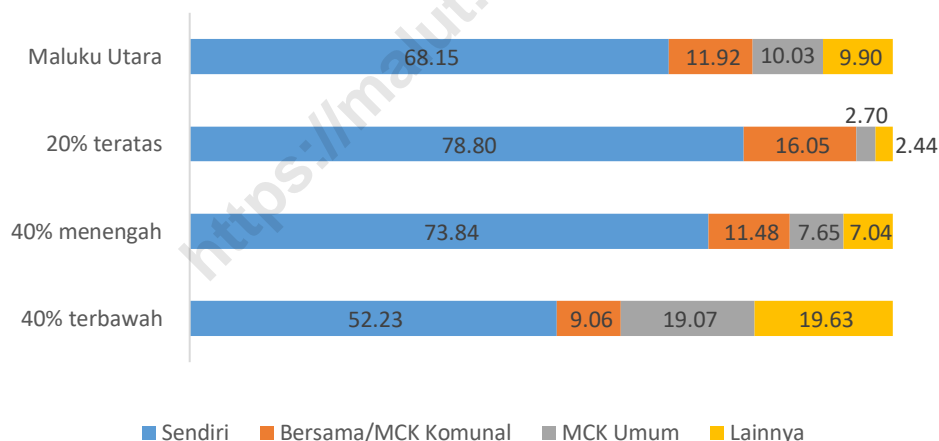
Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah mayoritas rumah tangga menggunakan semen/bata merah untuk lantai rumahnya yaitu sebesar 70,41 persen, sedangkan yang memakai jenis lantai tanah masih cukup banyak yaitu sebesar 9,06 persen. Terdapat 10,13 persen rumah tangga pada kelompok

pengeluaran ini menggunakan jenis lantai marmer/granit/keramik dan sebesar 10,40 persen menggunakan jenis lantai lainnya.

Secara umum, semakin tinggi kelompok pengeluaran penduduk di Maluku Utara maka jenis lantai rumahnya semakin bagus serta semakin sedikit yang menggunakan jenis lantai dari semen/bata merah, tanah, atau jenis lantai lainnya. Sebaliknya, semakin rendah kelompok pengeluaran penduduk maka semakin banyak rumah tangga yang menggunakan jenis lantai dari semen/bata merah, tanah, dan jenis lantai lainnya serta semakin sedikit yang menggunakan marmer/granit/keramik sebagai bahan utama lantai rumahnya.

Selain melihat jenis bahan bangunan utama lantai rumah terluas, kondisi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara juga bisa dilihat dari kepemilikan fasilitas tempat buang air besar.

**Gambar 5.5**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Jumlah rumah tangga di Maluku Utara yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri yaitu sebesar 68,15 persen, sebesar 11,92 persen menggunakan fasilitas buang air besar bersama dengan beberapa rumah tangga lainnya/MCK Komunal, dan sebesar 10,03 persen menggunakan fasilitas buang air besar di MCK umum, serta sebesar 9,90 persen tidak memiliki fasilitas buang air besar/tidak menggunakannya. Secara umum, semakin tinggi kelompok pengeluarannya maka semakin banyak yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau memiliki fasilitas buang air besar bersama, sebaliknya semakin rendah kelompok

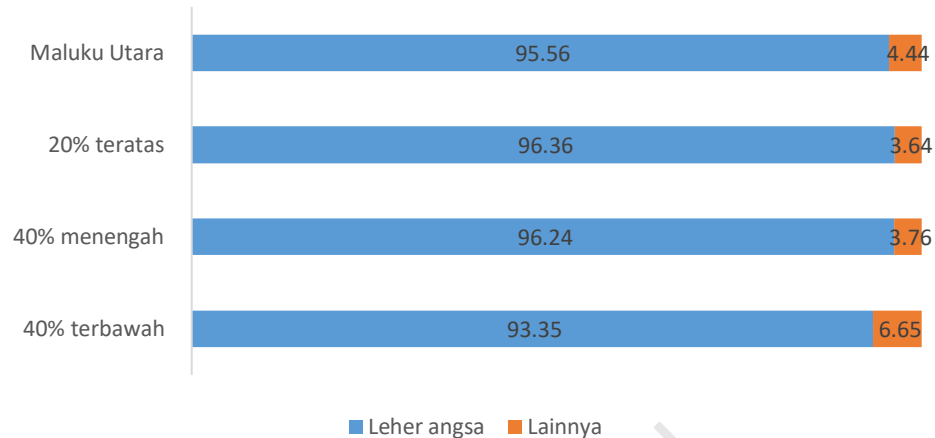
pengeluarannya maka semakin sedikit yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri namun semakin banyak yang menggunakan fasilitas buang air besar lainnya (MCK umum atau bahkan tidak memiliki fasilitas buang air besar sama sekali).

Pada kelompok pengeluaran 20% teratas, mayoritas rumah tangga memiliki fasilitas buang air besar sendiri yaitu sebesar 78,80 persen dan sebesar 16,05 persen menggunakan fasilitas buang air besar bersama/MCK Komunal, sebesar 2,70 persen menggunakan fasilitas buang air besar MCK umum, serta 2,44 persen tidak memiliki fasilitas buang air besar. Pada kelompok pengeluaran 40% menengah, sebesar 73,84 persen memiliki fasilitas buang air sendiri, sebesar 11,48 persen menggunakan fasilitas buang air besar bersama/MCK Komunal, sebesar 7,65 persen menggunakan fasilitas buang air besar MCK umum, dan sebesar 7,04 persen tidak memiliki fasilitas buang air besar.

Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah sebesar 52,23 persen penduduk memiliki fasilitas buang air besar sendiri, sebesar 9,06 persen menggunakan fasilitas buang air besar bersama/MCK Komunal, sebesar 19,07 persen menggunakan fasilitas buang air besar MCK umum, dan sebesar 19,63 persen tidak menggunakan fasilitas buang air besar/tidak memiliki fasilitas buang air besar. Tingginya rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar pada kelompok pengeluaran 40% terbawah dikarenakan pada kelompok pengeluaran ini masih membuang air besar di kebun, pantai, atau tanah lapang, lubang tanah, atau tempat lainnya.

Aspek perumahan lain yang tidak kalah penting dalam mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk di Maluku Utara yaitu jenis kloset yang digunakan. Sebagian rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau yang menggunakan fasilitas buang air besar bersama rumah tangga tertentu memiliki jenis kloset leher angsa yaitu sekitar 95,56 persen dan sisanya sebesar 4,44 persen menggunakan jenis kloset lainnya seperti plengsengan dengan/tanpa tutup, cemplung, maupun cubluk.

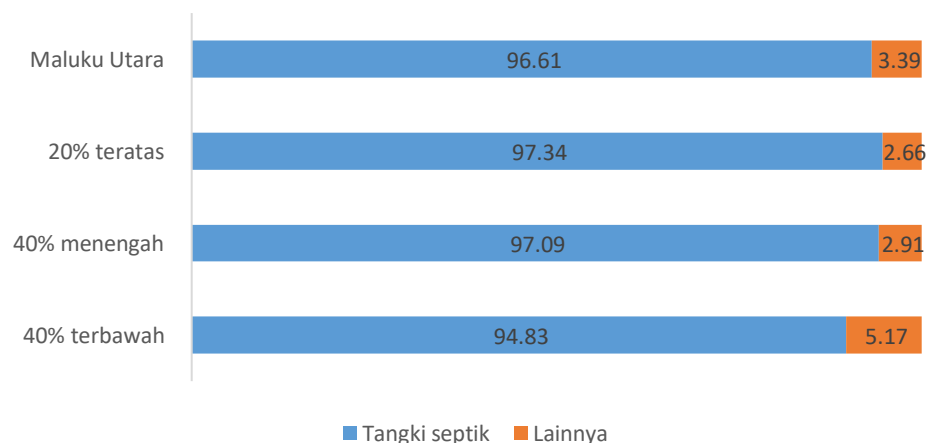
**Gambar 5.6**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan Rumah Tangga dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Pada kelompok pengeluaran 20% teratas, sebesar 96,36 persen menggunakan jenis kloset leher angsa dan sebesar 3,64 persen menggunakan jenis kloset lainnya. Pada kelompok pengeluaran 40% menengah sebesar 96,24 persen menggunakan jenis kloset leher angsa dan sisanya sebesar 3,76 persen menggunakan jenis kloset lainnya. Sedangkan pada kelompok pengeluaran 40% terbawah terdapat 93,35 persen yang menggunakan jenis kloset leher angsa dan sisanya sebesar 6,65 persen menggunakan jenis kloset lainnya.

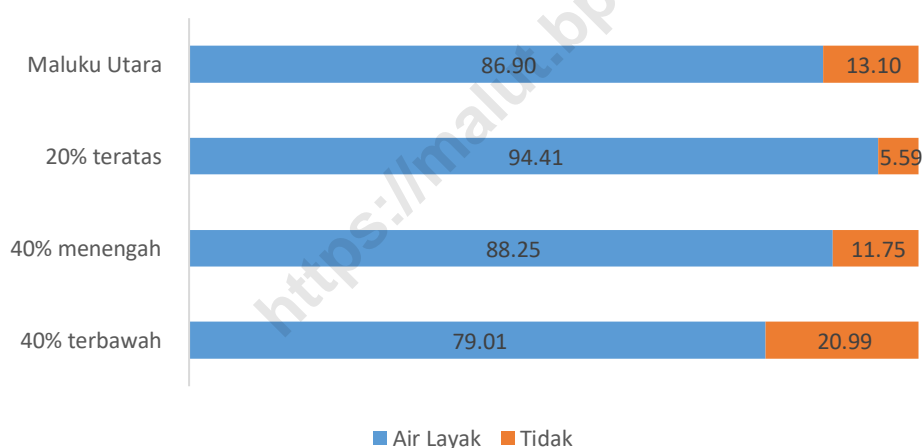
**Gambar 5.7**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Sebagian rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau yang menggunakan fasilitas buang air besar bersama rumah tangga tertentu menggunakan tanki septik sebagai tempat pembuangan akhir tinja yaitu sebesar 96,61 persen dan sisanya menggunakan tempat pembuangan lainnya seperti kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya. Besarnya rumah tangga yang menggunakan tanki septik melebihi 90 persen rumah tangga pada masing-masing kelompok pengeluaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Maluku Utara sudah banyak yang memahami bahwa tempat pembuangan akhir tinja rumah tangga sebaiknya ditampung dengan menggunakan tanki septik.

**Gambar 5.8**  
**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



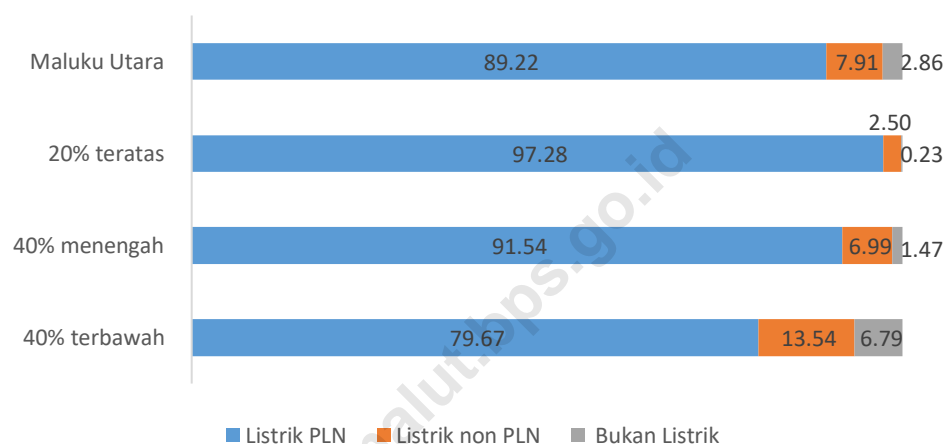
Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Mulai tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan menggunakan air minum layak jika sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Begitu pula ketika sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang namun sumber air utama untuk mandi/cuci/dll yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindungi, mata air terlindung, dan air hujan.

Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, terdapat 79,01 persen rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang layak. Pada kelompok 40%

menengah sebesar sebesar 88,25 persen rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang layak. Sedangkan pada kelompok pengeluaran 20% teratas hanya terdapat 94,41 persen rumah tangga saja yang menggunakan sumber air minum yang layak. Di Maluku Utara secara keseluruhan, rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang layak adalah sebesar 86,90 persen.

**Gambar 5.9**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Penerangan dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



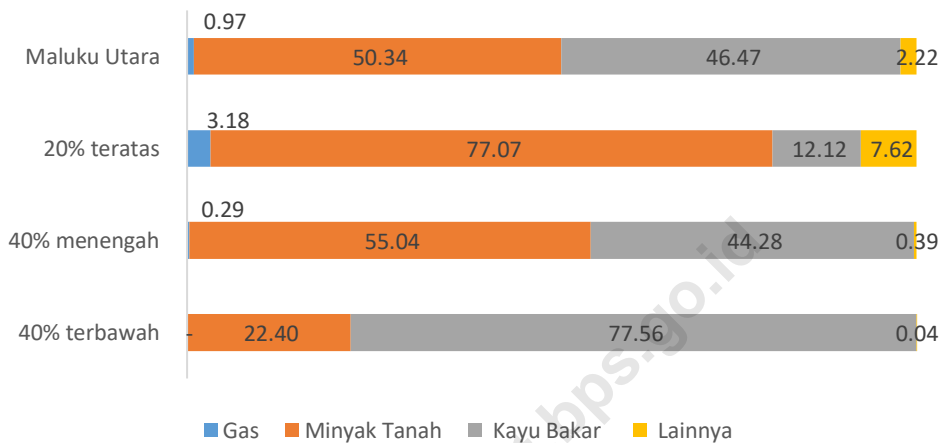
Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Sebesar 89,22 persen rumah tangga di Maluku Utara menggunakan sumber penerangan dari listrik PLN, sebesar 7,91 menggunakan sumber penerangan listrik dari non PLN (listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya/PLTS, menggunakan generator, atau sumber penerangan listrik lainnya), dan sebesar 2,86 persen menggunakan sumber penerangan bukan listrik (menggunakan lilin, pelita, atau lainnya). Pada kelompok pengeluaran 20% teratas, sebesar 97,28 persen rumah tangga sudah menggunakan sumber penerangan dari listrik PLN, sebesar 2,50 persen menggunakan sumber penerangan listrik dari non PLN, dan hanya sebesar 0,23 persen saja yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik.

Pada kelompok pengeluaran 40% menengah terdapat 91,54 rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik dari PLN, sebanyak 6,99 persen rumah tangga menggunakan sumber penerangan listrik dari non PLN dan sebesar 1,47 persen menggunakan sumber penerangan bukan listrik. Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, sebanyak 79,67 persen rumah tangga menggunakan

sumber penerangan listrik PLN, sebanyak 13,54 persen rumah tangga menggunakan sumber penerangan listrik non PLN dan sebesar 6,79 persen rumah tangga menggunakan sumber penerangan bukan listrik.

**Gambar 5.10**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Jenis bahan bakar utama rumah tangga untuk memasak merupakan aspek perumahan lainnya yang terkait dengan kesejahteraan penduduk di Maluku Utara. Kelompok pengeluaran teratas biasanya mampu untuk membeli bahan bakar seperti minyak tanah atau gas elpiji sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Di sisi lain, kelompok pengeluaran terbawah biasanya tidak memiliki cukup uang untuk membeli minyak tanah atau gas elpiji sehingga biasanya mencari kayu bakar di kebun atau di hutan untuk memasak. Jenis bahan bakar utama untuk memasak rumah tangga di Maluku Utara yang paling banyak adalah minyak tanah yaitu sebesar 50,34 persen lalu menggunakan kayu bakar sebesar 46,47 persen, menggunakan gas (gas 5,5kg dan 12 kg) sebesar 0,97 persen, dan bahan bakar lainnya (listrik dan tidak memasak) sebesar 2,22 persen.

Pada kelompok pengeluaran 20% teratas, rumah tangga paling banyak menggunakan bahan bakar minyak tanah sebagai bahan bakar utama untuk memasak yaitu sebesar 77,07 persen dan rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama untuk memasak adalah sebesar 12,12 persen, sebesar 3,18 persen rumah tangga telah beralih ke bahan bakar gas, serta



sebesar 7,62 persen rumah tangga menggunakan jenis bahan bakar lainnya (listrik dan tidak memasak).

Pada kelompok pengeluaran 40% menengah terdapat 55,04 persen rumah tangga yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar utama untuk memasak, serta sebesar 44,28 persen rumah tangga menggunakan kayu bakar untuk memasak, sebesar 0,29 persen rumah tangga memasak dengan gas, dan sebesar 0,39 persen yang menggunakan jenis bahan bakar lainnya (listrik dan tidak memasak). Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah terdapat 77,56 persen rumah tangga yang menggunakan bahan bakar kayu bakar sebagai bahan bakar utama untuk memasak, sebesar 22,40 persen rumah tangga menggunakan bahan bakar minyak tanah sebagai bahan bakar utama untuk memasak serta sebesar 0,04 persen rumah tangga yang menggunakan jenis bahan bakar lainnya (listrik dan tidak memasak).

<https://malut.bps.go.id>

<https://malut.bps.go.id>

# LAIN-LAIN



Selain melihat **tingkat kesejahteraan** rakyat dari **aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan dan perumahan**, aspek lain yang bisa menggambarkan keadaan kesejahteraan rakyat adalah **penggunaan HP, komputer dan internet**. Selain itu tingkat kesejahteraan rakyat juga bisa dilihat dari **kepemilikan aset-aset rumah tangga seperti kepemilikan AC, komputer, kendaraan bermotor, tanah/lahan maupun aset lainnya**.

penduduk Maluku Utara yang berumur 5 tahun ke atas :

**40%**  
**terbawah** → **35,84%**  
memiliki HP

**40%**  
**menengah** → **61,72%**  
memiliki HP

**20%**  
**keatas** → **82,88%**  
memiliki HP

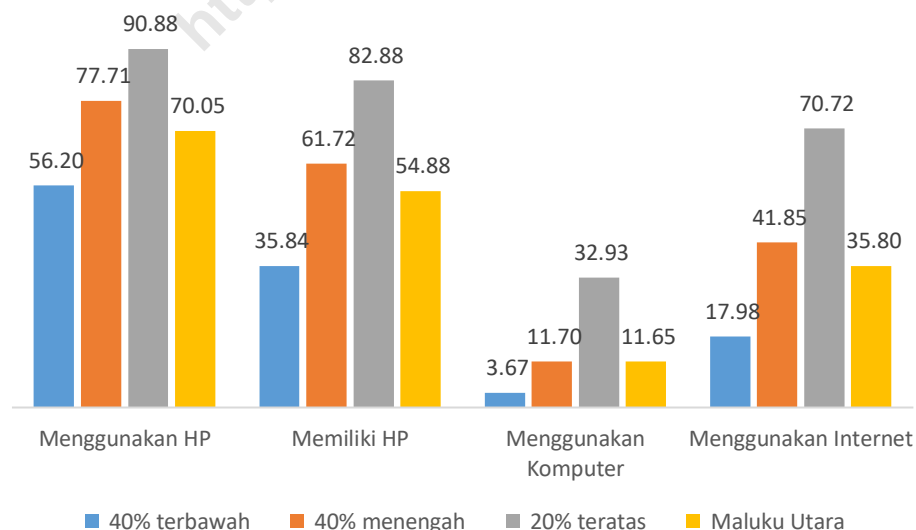


## 6. LAIN-LAIN

Selain melihat tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan dan perumahan, aspek lain yang bisa menggambarkan keadaan kesejahteraan rakyat adalah penggunaan HP, komputer dan internet. Selain itu tingkat kesejahteraan rakyat juga bisa dilihat dari kepemilikan aset-aset rumah tangga seperti kepemilikan AC, komputer, kendaraan bermotor, tanah/lahan maupun aset lainnya.

Penggunaan HP (*Handphone*) oleh berbagai kalangan baik anak muda ataupun orang tua pada jaman milenial seperti sekarang ini merupakan hal yang sangat wajar. Hal tersebut dikarenakan jaringan telekomunikasi pada jaman sekarang lebih canggih serta tuntutan jaman mengharuskan penduduk pada jaman sekarang bisa menguasai teknologi HP. Banyaknya penduduk Maluku Utara yang menggunakan dan memiliki HP serta menggunakan komputer dan internet akan dibahas pada bagian ini.

**Gambar 6.1**  
**Persentase Rumah Tangga Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Pada Gambar 6.1 terlihat jelas bahwa pada kelompok pengeluaran 20% teratas merupakan kelompok pengeluaran yang paling banyak menggunakan HP,

memiliki HP, menggunakan komputer, serta menggunakan internet. Begitu pula pada kelompok pengeluaran 40% terbawah terlihat bahwa kelompok pengeluaran ini merupakan kelompok pengeluaran yang paling sedikit menggunakan HP, memiliki HP, menggunakan komputer, serta menggunakan internet. Penduduk Maluku Utara yang berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan HP adalah sebesar 70,05 persen. Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, terdapat sebesar 56,20 persen penduduk yang berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan HP, sedangkan pada kelompok pengeluaran 40% menengah terdapat 77,71 persen, dan pada kelompok pengeluaran 20% teratas terdapat sebanyak 90,88 persen penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan HP.

Berdasarkan kepemilikan HP, sebanyak 54,88 persen penduduk Maluku Utara yang berumur 5 tahun ke atas memiliki HP. Apabila dilihat menurut kelompok pengeluarannya, sebanyak 35,84 persen penduduk berumur 5 tahun ke atas pada kelompok pengeluaran 40% terbawah memiliki HP, sedangkan pada kelompok pengeluaran 40% menengah sebanyak 61,72 persen dan pada kelompok pengeluaran 20% teratas sebanyak 82,88 penduduk berumur 5 tahun ke atas yang memiliki HP.

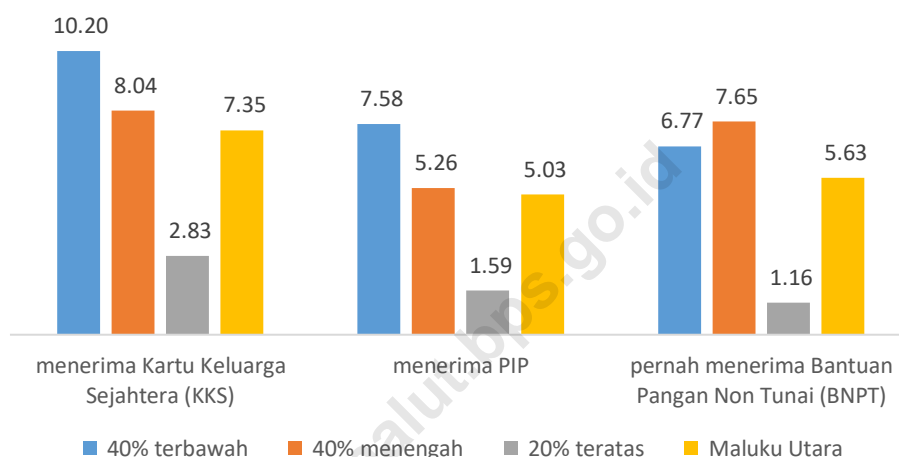
Selanjutnya, tingkat kesejahteraan rakyat bisa dilihat dari pemakaian komputer. Sebanyak 11,65 persen penduduk Maluku Utara yang berumur 5 tahun ke atas menggunakan komputer. Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan komputer hanya sebesar 3,67 persen saja, sedangkan pada kelompok pengeluaran 40% menengah terdapat sebesar 11,70 persen dan sebanyak 32,93 persen pada kelompok pengeluaran 20% teratas.

Tingkat kesejahteraan rakyat bisa juga kita lihat dari penggunaan internet. Penduduk Maluku Utara yang berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan internet hanya sebesar 35,80 persen saja. Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, penduduk berumur 5 tahun ke atas pada kelompok pengeluaran 40% terbawah terdapat sebesar 17,98 persen penduduk saja yang menggunakan internet, sedangkan pada kelompok pengeluaran 40% menengah terdapat sebesar 41,85 persen dan pada kelompok pengeluaran 20% teratas terdapat sebanyak 70,72 persen.

Tingkat kesejahteraan juga bisa dilihat dari jenis program perlindungan sosial yang diterima oleh rumah tangga. Program-program perlindungan sosial

yang dibahas pada bagian ini yaitu program beras miskin (raskin) atau beras sejahtera (rastra), Program Indonesia Pintar (PIP), serta Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Banyaknya rumah tangga di Maluku Utara yang menerima program perlindungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.2 di bawah ini.

**Gambar 6.2**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Rumah tangga penerima KKS di Maluku Utara yaitu sebesar 7,35 persen dimana pada kelompok pengeluaran 40% terbawah terdapat 10,20 persen rumah tangga yang menerima program KKS, pada kelompok pengeluaran 40% menengah terdapat 8,04 persen rumah tangga yang menerima program KKS dan sebesar 2,83 persen rumah tangga pada kelompok pengeluaran 20% teratas menerima program perlindungan sosial KKS.

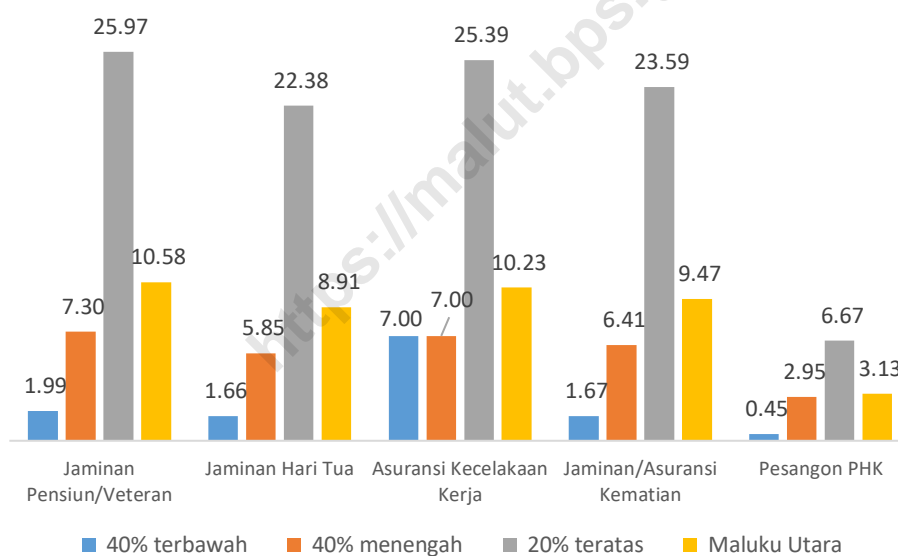
Rumah tangga penerima PIP di Maluku Utara yaitu sebesar 5,03 persen. Jika dilihat menurut kelompok pengeluarannya, sebesar 7,58 persen rumah tangga pada kelompok pengeluaran 40% terbawah menerima PIP, sebesar 5,26 persen rumah tangga pada kelompok pengeluaran 40% menengah menerima PIP dan sebesar 1,59 persen rumah tangga pada kelompok pengeluaran 20% teratas menerima PIP pada Agustus 2019 s.d Februari 2020.

Sebesar 5,63 persen rumah tangga di Maluku Utara menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, jumlah rumah tangga penerima program BNPT adalah sebesar 6,77 persen, sedangkan

pada kelompok pengeluaran 40% menengah ada sebanyak 7,65 persen dan pada kelompok pengeluaran 20% teratas terdapat 1,16 pesen rumah tangga yang menerima program BNPT.

Jaminan sosial menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kesejahteraan rumah tangga. Dengan adanya jaminan sosial, rumah tangga akan merasa lebih tenang dan terbantu pada saat masa sulit seperti terkena PHK, mengalami kematian/kecelakaan kerja, dan tabungan hari tua. Persentase rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan sosial dalam setahun terakhir menurut jenis jaminan sosial dan kelompok pengeluaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 6.3**  
**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Jaminan Sosial dan Kelompok Pengeluaran, 2020**



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Rumah tangga penerima jaminan sosial berupa jaminan pensiun/veteran di Maluku Utara adalah sebesar 10,58 persen. Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah hanya terdapat 1,99 persen rumah tangga saja yang menerima jaminan pensiun/veteran, sedangkan pada kelompok pengeluaran 40% menengah terdapat 7,30 persen rumah tangga yang menerima jaminan pensiun/veteran, dan pada kelompok pengeluaran 20% teratas terdapat sebesar 25,97 persen rumah tangga yang menerima jaminan pensiun/veteran.



Rumah tangga penerima jaminan sosial berupa jaminan hari tua di Maluku Utara adalah sebesar 8,91 persen. Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah hanya terdapat 1,66 persen rumah tangga saja yang menerima jaminan hari tua, sedangkan pada kelompok pengeluaran 40% menengah terdapat 5,85 persen rumah tangga yang menerima jaminan hari tua, dan pada kelompok pengeluaran 20% teratas terdapat sebesar 22,38 persen rumah tangga yang menerima jaminan hari tua.

Rumah tangga penerima jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja di Maluku Utara adalah sebesar 10,23 persen. Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah hanya terdapat 7,00 persen rumah tangga saja yang menerima jaminan kecelakaan kerja, sedangkan pada kelompok pengeluaran 40% menengah terdapat 7,00 persen rumah tangga yang menerima jaminan kecelakaan kerja, dan pada kelompok pengeluaran 20% teratas terdapat sebesar 25,39 persen rumah tangga yang menerima jaminan kecelakaan kerja.

Rumah tangga penerima jaminan sosial berupa jaminan asuransi kematian di Maluku Utara adalah sebesar 9,47 persen. Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah hanya terdapat 1,67 persen rumah tangga saja yang menerima jaminan asuransi kematian, sedangkan pada kelompok pengeluaran 40% menengah terdapat 6,41 persen rumah tangga yang menerima jaminan asuransi kematian, dan pada kelompok pengeluaran 20% teratas terdapat sebesar 23,59 persen rumah tangga yang menerima jaminan asuransi kematian.

Rumah tangga penerima jaminan sosial berupa pesangon PHK di Maluku Utara adalah sebesar 3,13 persen. Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah hanya terdapat 0,45 persen rumah tangga saja yang menerima pesangon PHK, sedangkan pada kelompok pengeluaran 40% menengah terdapat 2,95 persen rumah tangga yang menerima pesangon PHK, dan pada kelompok pengeluaran 20% teratas terdapat sebesar 6,67 persen rumah tangga yang menerima pesangon PHK.

Kepemilikan aset atau fasilitas perumahan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Aset yang dimaksud seperti lemari es/kulkas, AC, komputer/laptop, emas/perhiasan yang lebih dari/sama dengan 10 gram, sepeda motor, perahu, perahu motor, mobil, TV layar datar yang besarnya lebih dari/sama dengan 32 inci, serta kepemilikan lahan/tanah. Persentase rumah tangga Maluku Utara dan jenis aset yang dimiliki bisa dilihat pada Tabel 6.1 yang disajikan menurut kelompok pengeluaran versi *World Bank*.

Secara keseluruhan, aset yang paling banyak dimiliki rumah tangga yaitu aset berupa tanah/lahan (sebesar 83,15 persen), aset terbanyak kedua yang dimiliki oleh rumah tangga yaitu sepeda motor sebesar 56,51 persen. Sebesar 39,34 persen rumah tangga di Maluku Utara memiliki lemari es/kulkas dan sebesar 18,51 persen memiliki komputer/laptop, sebesar 10,52 persen rumah tangga memiliki emas/perhiasan yang beratnya lebih/sama dengan dari 10 gram, serta sebesar 10,30 persen rumah tangga memiliki dan TV layar datar yang besar layarnya lebih dari/sama dengan 32 inci. Aset-aset lain seperti AC, perahu, perahu motor, dan mobil tidak banyak dimiliki oleh rumah tangga karena besarnya kurang dari 10 persen rumah tangga di Maluku Utara. Apabila dilihat menurut kelompok pengeluaran, kepemilikan aset pada ketiga kelompok pengeluaran menunjukkan pola yang berbeda-beda.

**Tabel 6.1**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Aset yang Dimiliki dan Kelompok Pengeluaran, 2020**

Jenis Aset	40% terbawah	40% menengah	20% teratas	Maluku Utara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lemari Es / Kulkas	14,78	41,45	65,92	39,34
AC	0,17	2,96	22,78	7,36
Komputer / Laptop	3,46	14,91	42,22	18,51
Emas / Perhiasan ( $\geq$ 10 Gram)	1,71	8,66	24,04	10,52
Sepeda Motor	33,64	61,98	75,93	56,51
Perahu	10,03	7,50	1,91	6,83
Perahu Motor	8,96	5,66	5,04	6,57
Mobil	0,51	2,98	13,15	4,90
TV Layar Datar ( $\geq$ 30 Inci)	1,65	7,79	24,63	10,30
Tanah / Lahan	87,46	85,15	74,90	83,15

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 (diolah)

Pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, sebesar 87,46 persen rumah tangga memiliki aset berupa tanah/lahan, hal tersebut dikarenakan pada kelompok pengeluaran ini mayoritas rumah tangganya dimungkinkan adalah rumah tangga pertanian, baik petani yang mengusahakan tanaman padi atau palawija, cengkeh, pala, kelapa (untuk kemudian diolah menjadi kopra), atau tanaman pertanian lainnya sehingga tidak mengherankan kalau lebih dari 80 persen rumah tangga pada kelompok pengeluaran ini memiliki aset berupa tanah/lahan. Sebanyak 33,64

persen rumah tangga pada kelompok pengeluaran ini memiliki sepeda motor, sebanyak 14,78 persen memiliki lemari es/kulkas, dan sebanyak 10,03 persen rumah tangga memiliki perahu. Aset yang paling jarang dimiliki pada kelompok pengeluaran ini yaitu AC (hanya sebesar 0,17 persen rumah tangga saja yang memiliki), mobil (hanya sebesar 0,51 persen), emas/perhiasan yang beratnya lebih dari/sama dengan 10 gram (hanya sebesar 1,71 persen) dan televisi layar datar yang besar layarnya lebih dari/sama dengan 32 inci (hanya sebesar 1,65 persen).

Pada kelompok pengeluaran 40% menengah, sebesar 85,15 rumah tangga memiliki aset berupa tanah/lahan. Tanah/lahan merupakan aset yang paling banyak dimiliki pada kelompok pengeluaran ini. Selanjutnya, pada kelompok pengeluaran 40% menengah terdapat 61,98 persen rumah tangga yang memiliki sepeda motor. Sepeda motor merupakan aset yang paling banyak kedua setelah tanah/lahan yang dimiliki oleh rumah tangga pada kelompok pengeluaran ini. Selanjutnya, aset yang dimiliki pada kelompok pengeluaran ini diurutkan dari yang terbanyak adalah lemari es/kulkas yang besarnya adalah 41,45 persen, komputer/laptop sebesar 14,91 persen, perahu motor sebesar 5,66 persen, perahu sebesar 7,50 persen, emas/perhiasan yang beratnya lebih dari/sama dengan 10 gram sebesar 8,66 persen, TV layar datar yang besarnya lebih dari/sama dengan 32 inci sebesar 7,79 persen. Aset yang paling sedikit dimiliki pada kelompok pengeluaran ini yaitu mobil yang hanya sebesar 2,98 persen dan AC yang besarnya 2,96 persen.

Pada kelompok pengeluaran 20% teratas, sebanyak 74,90 persen rumah tangga memiliki aset berupa tanah/lahan. Aset tanah/lahan merupakan aset yang paling banyak dimiliki pada kelompok pengeluaran ini. Aset yang paling banyak kedua yang dimiliki pada kelompok pengeluaran ini yaitu sepeda motor, yaitu sebanyak 75,93 persen. Selanjutnya, aset yang paling banyak ketiga yang dimiliki pada kelompok pengeluaran ini yaitu lemari es/kulkas yaitu sebesar 65,92 persen. Rumah tangga yang memiliki komputer/laptop pada kelompok pengeluaran ini yaitu sebesar 42,22 persen. Rumah tangga yang memiliki emas/perhiasan dengan berat lebih dari/sama dengan 10 gram yaitu sebesar 24,04 persen, yang memiliki AC sebesar 22,78 persen, yang memiliki TV layar datar dengan besar layarnya lebih dari/sama dengan 32 inci yaitu sebesar 24,63 persen, serta yang memiliki mobil yaitu sebesar 13,15 persen. Aset yang paling sedikit dimiliki pada kelompok pengeluaran ini yaitu perahu yang besarnya hanya 1,91 persen dan perahu motor yang besarnya juga hanya 5,04 persen rumah tangga saja.

<https://malut.bps.go.id>

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**JL. STADION NO 65 TERNATE**

**TELP (0921) 3127878, FAKS (0921) 3126301**

**HOME PAGE: [malut.bps.go.id](http://malut.bps.go.id) E-MAIL: [bps8200@bps.go.id](mailto:bps8200@bps.go.id)**